



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

✓
G
A
A

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015-2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional grand design reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari suatu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
8. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, pelayanan publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

BAB III SASARAN DAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Sasaran perubahan Reformasi Birokrasi adalah :
 - a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
 - c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

- (2) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi aspek manajemen pemerintahan yang terdiri atas :
- a. organisasi;
 - b. tatalaksana;
 - c. peraturan perundang-undangan;
 - d. sumber daya manusia aparatur;
 - e. pengawasan;
 - f. akuntabilitas;
 - g. pelayanan publik, dan
 - h. pola pikir dan budaya kerja aparatur

BAB IV
HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu
Area Perubahan Bidang Organisasi

Pasal 5

Hasil yang diharapkan dari area perubahan organisasi berupa organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat sasaran.

Bagian Kedua
Area Perubahan Bidang Tatalaksana

Pasal 6

Hasil yang diharapkan dari area perubahan tatalaksana berupa sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga
Area Perubahan Bidang Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7

Hasil yang diharapkan dari area perubahan peraturan perundang-undangan berupa regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

Bagian Keempat
Area Perubahan Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 8

Hasil yang diharapkan dari area sumber daya manusia aparatur berupa sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, professional berkinerja tinggi dan sejahtera

Bagian Kelima
Area Perubahan Bidang Pengawasan

Pasal 9

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pengawasan adalah berupa penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

D
e
f

Bagian Keenam
Area Perubahan Bidang Akuntabilitas

Pasal 10

Hasil yang diharapkan dari area perubahan akuntabilitas adalah berupa meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Bagian Ketujuh
Area Perubahan Bidang Pelayanan Publik

Pasal 11

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik adalah berupa pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Area Perubahan Bidang Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur

Pasal 12

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur berupa birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PROGRAM DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan peraturan perundang-undangan;
 - c. penataan dan penguatan organisasi;
 - d. penataan tatalaksana
 - e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
 - f. penguatan pengawasan;
 - g. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kesatu
Program Manajemen Perubahan

Pasal 14

Sasaran program manajemen perubahan adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.

R
0
A
f

Bagian Kedua
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 15

Sasaran penataan peraturan perundang-undangan adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Bagian Ketiga
Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Pasal 16

Sasaran penataan dan penguatan organisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat sasaran.

Bagian Keempat
Program Penataan Tatalaksana

Pasal 17

Sasaran penataan tatalaksana adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Bagian Kelima
Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 18

Sasaran penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur adalah untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi dan transparan.

Bagian Keenam
Program Penataan Pengawasan

Pasal 19

Sasaran penataan pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Ketujuh
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pasal 20

Sasaran penguatan akuntabilitas kinerja adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Handwritten mark: a blue checkmark-like symbol above the word "efektif" written vertically in blue ink.

Bagian Kedelapan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pasal 21

Sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 22

Sasaran monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi.

BAB VI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu
Road Map Reformasi Birokrasi

Pasal 23

Untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Quick Wins

Pasal 25

Quick Wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan citra pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kepercayaan masyarakat.

BAB VII
IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 26

- (1) Implementasi program/kegiatan reformasi birokrasi meliputi bimbingan teknis/konsultasi teknis implementasi program/kegiatan reformasi birokrasi dalam rangka penetapan road map reformasi birokrasi.

17
16
15
14

- (2) Monitoring dan evaluasi meliputi pembinaan dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi serta melakukan evaluasi berdasarkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal **2 Maret** 2016

BUPATI KUBU RAYA,



FRUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal **2 Maret 2016**
PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN **2016** NOMOR **8**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 -2019

Road Map
Reformasi Birokrasi 2015 - 2019
Pemerintah Kabupaten
Kubu Raya

1
0
1
1



Road Map
Reformasi Birokrasi 2015 - 2019
Pemerintah Kabupaten
Kubu Raya

1
2
3



2015

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kubu Raya, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2015 – 2019. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu telah diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten Kubu Raya, antara lain sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), seluruh pejabat eselon II dan IIIa sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
3. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga sudah meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan penerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
4. Pimpinan sudah menandatangani Dokumen Fakta Integritas.
5. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga sudah komitmen untuk pencegahan KKN, antara lain telah disusun dokumen Rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah

Kabupaten Kubu Raya Kubu Raya dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan pelayanan perizinan terpadu oleh BPMPT.
2. Mendapatkan penghargaan investment Awards 2012 dan 2014 dibidang pelayanan Perizinan Terpadu.
3. Telah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
4. Pemberian pendidikan gratis kepada penduduk sampai dengan tingkat SMP;
5. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga sudah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Kubu Raya;
6. Telah dibentuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
7. Telah dibentuk dan dilaksanakan LPSE dan UPT ULP.
8. Telah dilaksanakan pelayanan E-KTP.
9. Penyusunan dan penerapan SOP,
10. Penerapan SPM
11. Pelaksanaan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)
12. Telah dilaksanakan penilaian / monitoring kepatuhan SKPD terhadap Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperoleh nilai kategori C (kurang)
2. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah)
3. Telah disusun TAPKIN Dan LAKIP SKPD / Kabupaten
4. Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) telah dilaksanakan
5. Penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk penilaian prestasi pegawai.
6. Adanya komitmen pimpinan terhadap disiplin pegawai
7. Telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU).
8. Telah dibentuk sistem pengelolaan pengaduan masyarakat di masing-masing SKPD.

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara dan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi,

mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Meningkatnya Integritas dan profesionalisme pegawai ASN. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kubu Raya diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten Kubu Raya, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.
4. Penegakan supermasi hukum dalam pemberantasan KKN, termasuk pemberian reward dan funisment.
5. Membentuk media center Kabupaten Kubu Raya untuk pengaduan masyarakat secara online dan pembentukan sekretariat PPID Kabupaten Kubu Raya.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh SKPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
2. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
3. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;
4. Meningkatkan kualitas disemua level pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat
6. Tersedianya SDM aparatur, sarana dan prasarana yang memadai baik kualitas maupun kuantitas untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan.
7. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen layanan pemerintah.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Kubu Raya;

2. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.
3. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
 - a. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;
 - b. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.
 - c. Meningkatkan disiplin SDM Aparatur dan manajemen untuk menciptakan aparatur yang handal dan akuntabel.
 - d. Tersedia sistem Informasi kepegawaian (simpeg)

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Salah satu aspek ketidakjelasan mengenai reward dan punishment, adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal dilaksanakan;
4. Belum tersedianya sarana pengaduan masyarakat untuk menyampaikan informasi indikasi terjadinya KKN.
5. Pengelolaan barang aset daerah belum optimal.
6. Tingkat kesejahteraan pegawai relatif masih rendah
7. Belum diterapkannya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)/waskat.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan relatif masih terbatas.
2. Rendahnya kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintahan menyebabkan tinggi keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Kubu Raya;
3. Masih banyak SKPD yang belum menyusun Standar Pelayanan.

2017

4. Pelayanan pendidikan, disamping kuantitas yang masih kurang, kualitas guru juga dipandang masih belum sesuai dengan kebutuhan.
5. Pencapaian target SPM masih rendah.
6. Penerapan SOP belum optimal
7. Penerapan hasil penilaian kepatuhan SKPD terhadap Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum optimal
8. Terdapat beberapa SKPD belum memiliki gedung kantor yang memadai.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Budaya kerja dan budaya hukum birokrasi yang masih dilingkupi oleh budaya patron klien, budaya meminta petunjuk, budaya pangreh praja (ingin dihormati, ingin dilayani) bukan budaya melayani. Dipengaruhi pula oleh faktor politis dan ekonomis yang berakibat pada rendahnya kinerja aparatur dan tidak dilaksanakannya berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang semua itu berakibat pada pelaksanaan pembangunan
2. Kinerja birokrasi belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak kompetennya pejabat yang menduduki jabatannya. Kompetensi jabatan sangat dipengaruhi oleh faktor manajemen, kepemimpinan, sikap dan perilaku (budaya hukum) birokrasi dan pimpinan daerah serta faktor-faktor lainnya yang saling berkait satu dengan lainnya
3. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Penerimaan dan penempatan pegawai belum dilakukan secara transparan sehingga menimbulkan kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
5. Disiplin pegawai masih rendah;
6. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.
7. Penerapan hasil anjab belum optimal.

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

a. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

1) Sumber Daya Manusia Aparatur

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- b) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
- c) Pemerintah Daerah Kubu Raya juga belum menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai;
- d) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;
- e) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan pegawai juga relatif masih rendah;
- f) Para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.

2) Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih sangat kurang, terlebih lagi untuk mendukung opini WTP serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;
- b) Meskipun SPIP sudah mulai diterapkan tetapi penerapannya belum sepenuhnya maksimal;
- c) Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas masih rendah sehingga tidak memberikan daya tarik bagi pegawai untuk mengembangkan karir di jabatan ini;
- d) Belum terdapat standard operating procedures yang baku dalam pelaksanaan pengawasan.

3) Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Mekanisme koordinasi yang lemah antara SKPD dan unit kerja di masing-masing SKPD, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi;
- b) Meskipun sudah diterapkan sistem e-audit dalam pengawasan, tetapi penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan standart pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c) Belum optimalnya penyediaan fasilitas kerja dan gedung kantor untuk mendorong efisiensi kinerja SKPD.

d) Belum menyusun standar pelayanan

b. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- 1) Mempertahankan opini WTP dari BPK;
- 2) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- 3) Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN dan pelayanan publik
- 4) Pendidikan gratis sampai tingkat SMA
- 5) Peningkatan kapasitas guru
- 6) Saluran internet di sejumlah tempat
- 7) Sistem integrasi layanan Jamkesda
- 8) Pelayanan kesehatan prima
- 9) Nilai akuntabilitas kinerja kategori C
- 10) Penerapan E-audit
- 11) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik

c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1) Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak masyarakat yang ingin mendapat pelayanan yang lebih baik lagi. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar SKPD yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- a) Pelayanan perizinan tertentu
- b) Pelayanan perizinan jasa usaha

- c) Pelayanan non perizinan

2). Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah: **Peningkatan kompetensi guru.** Salah satu peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan pendidikan adalah menyediakan guru yang telah memiliki sertifikasi. Dalam kaitan itu, penyediaan pelayanan untuk peningkatan kompetensi guru sehingga mampu memperoleh sertifikasi menjadi prioritas utama pada sektor pendidikan di Kabupaten Kubu Raya. Peningkatan jumlah guru yang memiliki sertifikasi diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kubu Raya.

Pendidikan adalah investasi emas yang akan bermanfaat nanti setelah 20 (dua puluh) tahun yang akan datang sebagai pembentukan mental, moral dan karakter bangsa, oleh karna itu perlu para pengajar yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan umum semata, tapi budi pekerti dan akhlak harus menjadi perhatian bagi siswa sejak dini (paud).

Kedua, Quick Wins. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- 1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- 2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- 3) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- 1) *Pilot Project* Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perizinan dan non perizinan sebagaimana menjadi prioritas sektor)

- 2) Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan berbasis *online*
- 3) *Pelayanan Kesehatan* terkait dengan bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memprioritaskan akan membangun rumah sakit umum daerah dan melakukan peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat seperti puskesmas dan puskesmas pembantu, beberapa puskesmas akan ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap dan disiapkan fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang memadai.

d. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Kubu Raya diambil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Inspektorat Kabupaten.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipandang, selain paling banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapat tugas menjadi SKPD yang menangani salah satu prioritas peningkatan pelayanan, yaitu Peningkatan Kompetensi Guru, dan 2 (dua) prioritas lainnya di tingkat SKPD, yaitu: penyediaan guru dan penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan dan ruang kegiatan belajar.

Inspektorat Kabupaten dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Kabupaten harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya.

e. Prioritas SKPD,

Prioritas SKPD yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

1) Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan

Prioritas lain dalam sektor pendidikan adalah penyediaan sarana penunjang yang meliputi antara lain penyediaan laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar.

SKPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Daerah akan menjadi SKPD yang berada digaris depan untuk melakukan

Handwritten mark: a blue checkmark and the letters 'e' and 'f' written vertically.

perubahan-perubahan melalui langkah-langkah konkrit sebagaimana direncanakan dalam dokumen ini.

2) Ruang kegiatan belajar (RKB)

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatif dan inovatif.

3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

a) Listrik

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Kubu Raya. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas.

b) Instalasi Air Bersih

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di kabupaten Kubu Raya

c) Jalan Kabupaten

Prioritas lain yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah penyediaan jalan kabupaten. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kabupaten Kubu Raya.

d) Jembatan

Kondisi demografis Kabupaten Kubu Raya yang banyak terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar Kecamatan dan Desa yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

e) Penyediaan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

4/1/1

f) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

g) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas SKPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap SKPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

R
G
A
T

RINGKASAN EKSEKUTIF		i
DAFTAR ISI		xii
Bab I	PENDAHULUAN	1
Bab II	GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	2
	A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah	2
	B. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan	3
	C. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah	4
Bab III	AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	7
	A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi	7
	B. Sasaran	12
	C. Kegiatan-kegiatan	17
	D. Rencana Aksi.	29
Bab IV	MONITORING DAN EVALUASI	30
	A. Monitoring	30
	B. Evaluasi	31
Bab V	Penutup	33
	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 - 2019	34

Handwritten blue scribbles and marks on the right margin.

Bab I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kubu Raya merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemeritahan daerah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kubu Raya, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2015 - 2019. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akubtabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah kabupaten Kubu Raya saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; (2014 sudah)
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
3. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
4. Pimpinan sudah menandatangani dokumen Fakta Integritas.
5. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk mencegah adanya KKN.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan pelayanan perizinan terpadu oleh BPMPT.
2. Mendapatkan penghargaan investment Awards 2014 dibidang pelayanan Perizinan Terpadu.
3. Pemberian pendidikan gratis kepada penduduk sampai dengan tingkat SMP;
4. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga sudah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Kubu Raya;
5. Telah dibentuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
6. Telah dibentuk dan dilaksanakan LPSE dan UPT ULP.
7. Telah dilaksanakan pelayanan E-KTP.
8. Penyusunan dan penerapan SOP,
9. Penerapan SPM
10. Penyusunan IKM (pelaksanaan survey kepuasan masyarakat)

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperoleh nilai kategori C (kurang)
2. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah)
3. Telah disusun TAPKIN Dan LAKIP SKPD / Kabupaten
4. Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) telah dilaksanakan
5. Penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk penilaian prestasi pegawai.
6. Adanya komitmen pimpinan terhadap disiplin pegawai
7. Telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

B. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri (Aparatur Sipil Negara (ASN)). Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kubu Raya diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten Kubu Raya, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.
4. Penegakan supremasi hukum dalam pemberantasan KKN, termasuk pemberian reward dan punishment.
5. Membentuk media center Kabupaten Kubu Raya untuk pengaduan masyarakat secara online dan pembentukan sekretariat PPID Kabupaten Kubu Raya.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh SKPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas disemua level pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat
6. Tersedianya SDM aparatur, sarana dan prasarana yang memadai baik kualitas maupun kuantitas untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan.
7. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen layanan pemerintah.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Kubu Raya;
2. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.
3. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
 - a. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai B;
 - b. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;
 - c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
 - d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.
 - e. Meningkatkan disiplin SDM Aparatur dan manajemen untuk menciptakan aparatur yang handal dan akuntabel.
 - f. Tersedia sistem Informasi kepegawaian (simpeg)

C. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Salah satu aspek ketidakjelasan mengenai reward dan punishment, adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal dilaksanakan;
4. Belum tersedianya sarana pengaduan masyarakat untuk menyampaikan informasi indikasi terjadinya KKN.
5. Pengelolaan barang aset daerah belum optimal.
6. Tingkat kesejahteraan pegawai relatif masih rendah
7. Belum diterapkannya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)/waskat.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan relatif masih terbatas.
2. Rendahnya kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintahan menyebabkan tinggi keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Kubu Raya;
3. Masih banyak SKPD yang belum menyusun Standar Pelayanan.
4. Pelayanan pendidikan, disamping kuantitas yang masih kurang, kualitas guru juga dipandang masih belum sesuai dengan kebutuhan.
5. Pencapaian target SPM masih rendah.
6. Penerapan SOP belum optimal
7. Penerapan hasil penilaian kepatuhan terhadap UU No.25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik belum optimal.
8. Terdapat beberapa SKPD belum memiliki gedung kantor dan fasilitas kerja yang memadai.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Budaya kerja dan budaya hukum birokrasi yang masih dilingkupi oleh budaya patron klien, budaya meminta petunjuk, budaya pangreh praja (ingin dihormati, ingin dilayani) bukan budaya melayani. Dipengaruhi pula oleh faktor politis dan ekonomis yang berakibat pada rendahnya kinerja aparatur dan tidak dilaksanakannya berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang semua itu berakibat pada pelaksanaan pembangunan
2. Kinerja birokrasi belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak kompetennya pejabat yang menduduki jabatannya. Kompetensi jabatan sangat dipengaruhi oleh faktor manajemen, kepemimpinan,

sikap dan perilaku (budaya hukum) birokrasi dan pimpinan daerah serta faktor-faktor lainnya yang saling berkait satu dengan lainnya

3. Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi relatif belum optimal;
4. Penempatan pegawai belum dilakukan secara transparan sehingga menimbulkan kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
5. Pengelolaan manajemen SDM aparatur belum didukung oleh sistem informasi kepegawaian (simpeg).
6. Disiplin pegawai masih rendah;
7. Penerapan hasil anjab belum optimal.
8. Belum adanya standar pelayanan.

R
o
k
t

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- 2) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
- 3) Pemerintah Daerah Kubu Raya juga belum menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai;
- 4) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;
- 5) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan pegawai juga relatif masih rendah;
- 6) Para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.

b. Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih sangat kurang, terlebih lagi untuk mendukung opini WTP serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;
- 2) Meskipun SPIP sudah mulai diterapkan tetapi penerapannya belum sepenuhnya maksimal;
- 3) Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas masih rendah sehingga tidak memberikan daya tarik bagi pegawai untuk mengembangkan karir di jabatan ini;
- 4) Belum terdapat standard operating procedures yang baku dalam pelaksanaan pengawasan.

c. Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Mekanisme koordinasi yang lemah antara SKPD dan unit kerja di

masing-masing SKPD, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi;

- 2) Meskipun sudah diterapkan sistem e-audit dalam pengawasan, tetapi penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 3) Belum Optimal penyediaan fasilitas kerja dan gedung kantor untuk mendorong efisiensi kinerja SKPD.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari BPK;
- b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- c. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN dan pelayanan Publik;
- d. Pendidikan gratis sampai tingkat SMA
- e. Peningkatan kapasitas guru
- f. Saluran internet di sejumlah tempat
- g. Sistem integrasi layanan Jamkesda
- h. Pelayanan kesehatan prima
- i. Penerapan E-audit
- j. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak masyarakat yang ingin mendapat pelayanan yang lebih baik lagi. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar SKPD yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- 1) Pelayanan izin tertentu
- 2) Pelayanan jasa usaha
- 3) Pelayanan non perizinan

b. Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah: **Peningkatan kompetensi guru.** Salah satu peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan pendidikan adalah menyediakan guru yang telah memiliki sertifikasi. Dalam kaitan itu, penyediaan pelayanan untuk peningkatan kompetensi guru sehingga mampu memperoleh sertifikasi menjadi prioritas utama pada sektor pendidikan di Kabupaten Kubu Raya. Peningkatan jumlah guru yang memiliki sertifikasi diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kubu Raya.

Pendidikan adalah investasi emas yang akan bermanfaat nanti setelah 20 (dua puluh) tahun yang akan datang sebagai pembentukan mental, moral dan karakter bangsa, oleh karena itu perlu para pengajar yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan umum semata, tapi budi pekerti dan akhlak harus menjadi perhatian bagi siswa sejak dini (paud).

c. Pelayanan Kesehatan

Terkait dengan bidang Kesehatan, pemerintah kabupaten kubu Raya memprioritaskan pembangunan rumah sakit umum daerah dan melakukan peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat seperti puskesmas dan puskesmas pembantu. Beberapa puskesmas akan ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap dan disiapkan fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang memadai.

Kedua, Quick Wins. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- c. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- a. *Pilot Project* Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perizinan sebagaimana menjadi prioritas sektor)
- b. Pengembangan sistem informasi Pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis *online*
- c. *Pelayanan Kesehatan* terkait dengan bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memprioritaskan akan membangun rumah sakit umum daerah dan melakukan peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat seperti puskesmas dan puskesmas pembantu, beberapa puskesmas akan ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap dan disiapkan fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang memadai.

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Kubu Raya diambil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Inspektorat Kabupaten.

Dinas Pendidikan dipandang, selain paling banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapat tugas menjadi SKPD yang menangani salah satu prioritas peningkatan pelayanan, yaitu Peningkatan Kompetensi Guru, dan 2 (dua) prioritas lainnya di tingkat SKPD, yaitu: penyediaan guru dan penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan dan ruang kegiatan belajar.

Inspektorat Daerah dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Kabupaten harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya.

5. Prioritas SKPD,

Prioritas SKPD yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

a. Penyediaan guru

Pelayanan pendidikan juga harus mampu menyediakan pelayanan bagi murid-murid. Dalam kaitan ini, prioritas pelayanan juga difokuskan pada penyediaan guru yang cukup di setiap sekolah dan sarana prasarana bagi kegiatan belajar mengajar siswa yang memadai.

b. Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan

Prioritas lain dalam sektor pendidikan adalah penyediaan sarana penunjang yang meliputi antara lain penyediaan laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar.

SKPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Daerah akan menjadi SKPD yang berada digaris depan untuk melakukan perubahan-perubahan melalui langkah-langkah konkrit sebagaimana direncanakan dalam dokumen ini.

c. Ruang kegiatan belajar (RKB)

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan belajar yang standar atau baik bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatif dan inovatif.

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

1) Listrik

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Kubu Raya. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas.

2) Instalasi Air Bersih

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di kabupaten Kubu Raya

3) Jalan Kabupaten

Prioritas lain yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah penyediaan jalan kabupaten. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya.

4) Jembatan

Kondisi demografis Kabupaten Kubu Raya yang banyak terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk

membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

5) Penyediaan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

6) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

7) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas SKPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap SKPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

B. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. SDM Aparatur

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemkab Kubu Raya	Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	80%	85%	90%	100%	100%
	Persentase pegawai yang	70%	80%	90%	100%	100%

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
	ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi					
	Persentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya kinerja pegawai	Prosentase pegawai yang capaian kerjanya sesuai target	70%	75%	80%	85%	90%
	Prosentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • Aturan disiplin • Etika • Pakta integritas 	70% (rata-rata)	75% (rata-rata)	80% (rata-rata)	85% (rata-rata)	90% (rata-rata)
Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya pimpinan yang menjadi role model	Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan <i>role model</i>	70%	80%	80%	80%	80%

b. Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawas	Jumlah auditor	8	12	16	20	20
	Persentase aparat pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya penerapan SPIP	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	70%	80%	90%	100%	100%
	Prosentase penyimpangan yang ditindaklanjuti tepat waktu	70%	80%	90%	100%	100%
	Prosentase SOP pengawasan yang diterapkan	70%	75%	90%	100%	100%

c. Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Prosentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	-	75%	90%	100%	100%
	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi	-	80%	90%	100%	100%

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2015	2016	2017	2018
	yang diselesaikan					
Meningkatnya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Prosentase jenis pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi	40%	50%	60%	80%	90%
	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik	70%	80%	80%	80%	80%
	Prosentase fasilitas kerja yang distandarisasikan	70%	75%	80%	85%	90%

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Diperolehnya Opini WTP dari BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Pejabat yang menyerahkan LHKPN	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	80%	95%	100%	100%	100%

c. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN dan pelayanan publik

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya efektivitas sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN dan pelayanan publik	Prosentase pengaduan dan pelayanan publik yang berhasil ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%

d. Pendidikan gratis sampai tingkat pendidikan dasar SD - SMP

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas pelayanan gratis pendidikan	Tingkat kepuasan penduduk atas pelayanan pendidikan gratis	70%	80%	80%	80%	80%

e. Peningkatan kapasitas guru

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kuantitas dan kualitas guru	Prosentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
	Rasio jumlah guru dengan kebutuhan	80%	80%	90%	100%	100%
	Prosentase guru yang telah memperoleh sertifikasi					

f. Saluran internet di sejumlah tempat

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pelayanan internet gratis di berbagai lokasi	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis	10%	15%	20%	25%	30%

g. Sistem integrasi layanan Jamkesda

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pelayanan Jamkesda	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Jamkesda	70%	80%	80%	80%	80%

h. Pelayanan kesehatan prima

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pelayanan kesehatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	70%	80%	80%	80%	80%

i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori C

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja menjadi A	Nilai akuntabilitas kinerja	CC	B	BB	BB	A

j. Penerapan E-audit dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik

Sasaran	Indikator	Target
---------	-----------	--------

		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Tingkat kepatuhan dalam pengelolaan keuangan	80%	95%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan pelayanan publik	75%	85%	95%	95%	95%

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Peningkatan kompetensi guru

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas guru	Prosentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
	Prosentase guru yang telah memperoleh sertifikasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase murid yang memperoleh nilai UAN di atas rata-rata nasional	50%	60%	70%	80%	80%

b. Pelayanan Perizinan

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pelayanan perizinan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	70%	80%	80%	80%	80%

c. Quick Wins

1) Pilot Project Penerapan PTSP

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan melalui PTSP	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui PTSP	70%	80%	80%	80%	80%

2) Pengembangan sistem informasi Pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat	70%	80%	80%	80%	80%

sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online	terhadap pelayanan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online					
--	---	--	--	--	--	--

4. Zona Integritas menuju WBK/WBBM (Diknas)

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2	5	10	20	semua SKPD
Meningkatnya kualitas pelayanan penda	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penda	70%	80%	80%	80%	80%

5. Prioritas SKPD

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing SKPD yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

C. Kegiatan-kegiatan

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. SDM Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Melakukan analisis jabatan;
- 2) Melakukan analisis beban kerja;
- 3) Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di SKPD sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
- 4) Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing SKPD, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun.
- 5) Memperbaiki sistem rekrutmen pegawai;
- 6) Melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;
- 7) Melaksanakan sistem rekrutment terbuka untuk jabatan tertentu;

Catatan: Kegiatan 1) sampai dengan 7) merupakan prioritas jangka pendek yang juga menjadi prioritas nasional.

- 8) Melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;
- 9) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;
- 10) Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;
- 11) Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
- 12) Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
- 13) Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 14) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 15) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
- 16) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
- 17) Menyusun rencana pengembangan kepribadian role model;
- 18) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 19) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 20) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja;
- 2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;
- 3) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
- 4) Melaksanakan penerapan SPIP
- 5) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun, mempertahankan opini WTP dari BPK, dan penerapan SPIP;
- 6) Memperbaiki SOP pengawasan;
- 7) Menerapkan SOP Pengawasan;
- 8) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;

c. Tatalaksana

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Memetakan proses penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

- 2) Menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- 3) Menyusun SOP;
- 4) Menyusun pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- 5) Melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan fungsi;
- 6) Memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 7) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan;
- 8) Menerapkan keterbukaan informasi publik;
- 9) Menyusun pedoman standarisasi fasilitas kantor;
- 10) Menerapkan standarisasi fasilitas kantor;
- 11) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 12) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 13) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK meliputi:

- 1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan dan aset daerah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyusunan laporan keuangan SKPD dan Pemda sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- 2) Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan dan aset/barang milik daerah;
- 3) Meningkatkan kompetensi pengelola keuangan dan aset SKPD;
- 4) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
- 5) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
- 2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- 3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan.
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN dan pelayanan publik

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN meliputi:

- 1) Merencanakan pengembangan sarana pengaduan dan pelayanan publik;
- 2) Melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan;
- 3) Mengelola pengaduan;
- 4) Memonitor tindak lanjut pengaduan;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

d. Pendidikan gratis sampai tingkat SMP

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan pendidikan gratis sampai tingkat SMP meliputi:

- 1) Menyusun kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis dan memastikan ketersediaan anggaran dimaksud;
- 2) Mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan gratis;
- 3) Melanjutkan pelaksanaan sistem pendidikan gratis sampai tingkat SMP;
- 4) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan gratis;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan gratis;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

e. Peningkatan kapasitas guru

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas guru meliputi:

- 1) Menyusun rencana kebutuhan guru pada setiap tingkatan pendidikan dan prediksi hingga tahun 2019;
- 2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;
- 3) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- 4) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kapasitas guru;
- 5) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas guru;
- 6) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas guru;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

f. Saluran internet di sejumlah tempat

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyediaan saluran internet di sejumlah tempat, meliputi:

- 1) Mengidentifikasi tempat-tempat strategis yang akan diberikan akses internet gratis;
- 2) Menyusun rencana penambahan akses internet gratis di lokasi strategis beserta pembiayaannya;
- 3) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 4) Melaksanakan seluruh rencana;
- 5) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

g. Sistem integrasi layanan Jamkesda

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka sistem integrasi layanan Jamkesda, meliputi:

- 1) Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan Jamkesda;
- 2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan Jamkesda terintegrasi dan pembiayaannya;
- 3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan Jamkesda;
- 4) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan evaluasi;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

h. Pelayanan kesehatan prima

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka sistem integrasi layanan Jamkesda, meliputi:

- 1) Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan kesehatan;
- 2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
- 3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
- 4) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan evaluasi;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori C

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi A, meliputi:

- 1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
- 3) Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 4) Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 5) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
- 6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- 7) Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;
- 8) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

j. Penerapan E-audit dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan E-audit, meliputi:

- 1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem e-audit dan pelayanan publik untuk perbaikan;
- 2) Menyusun rencana perbaikan;
- 3) Mengembangkan sistem e-audit yang terintegrasi dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
- 4) Melaksanakan e-audit sesuai dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
- 5) Melaksanakan monev pelaksanaan pelayanan publik
- 6) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 7) Melakukan evaluasi;
- 8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Peningkatan kompetensi guru

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi guru meliputi:

- 1) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- 2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;
- 3) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi guru;
- 4) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 5) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pelayanan Perizinan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan meliputi:

- (a). Melakukan telaahan pelayanan perizinan, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b). Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c). Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (d). Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Quick Wins

(a). Pilot Project Penerapan PTSP

- (1). Melakukan telaahan penerapan PTSP (mencakup terhadap kelembagaan, mekanisme koordinasi dan hubungan kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan, pengaturan kewenangan dan diskresi, kebutuhan SDM, penerapan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, perubahan peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat/menjadi kendala, dan lainnya);
- (2). Memilih jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP;
- (3). Menyusun rancangan PTSP;
- (4). Melakukan uji coba;
- (5). Menyempurnakan PTSP hasil uji coba;
- (6). Menerapkan PTSP untuk jenis pelayanan tertentu;
- (7). Melaksanakan monitoring;

- (8). Melaksanakan evaluasi;
 - (9). Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
 - (10). Mengembangkan PTSP untuk jenis-jenis pelayanan lain.
- (b). Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis *online*

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis *online*, meliputi:

- (1). Mengidentifikasi user requirement sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online;
 - (2). Menyusun sistem;
 - (3). Melakukan uji coba;
 - (4). Menyempurnakan sistem;
 - (5). Penerapan sistem;
 - (6). Monitoring
 - (7). Evaluasi
 - (8). Tindak lanjut perbaikan;
- (c). Pelayanan Kesehatan *Pelayanan Kesehatan* terkait dengan bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memprioritaskan akan membangun rumah sakit umum daerah dan melakukan peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat seperti puskesmas dan puskesmas pembantu, beberapa puskesmas akan ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap dan disiapkan fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang memadai.

R
e
f

d. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

- (a). Penyiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Inspektorat Kabupaten sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (b). Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (c). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (d). Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya
- (e). Monitoring
- (f). Evaluasi
- (g). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

	Program	Kegiatan
1.	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	1) Analisis Jabatan 2) Analisis beban Kerja 3) Penyusunan ulang/penyempurnaan standar kompetensi jabatan 4) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (termasuk tenaga auditor dan guru) 5) Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai 6) Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru 7) Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu 8) Pelaksanaan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai 9) Penyusunan training need (termasuk untuk tenaga guru dan auditor) 10) Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan auditor) 11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai 12) Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai 13) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai
		14) Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya 15) Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku 16) Penyusunan Rencana pengembangan kepribadian <i>role model</i> 17) Monitoring 18) Evaluasi 19) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 20) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
2.	Penguatan Pengawasan (kewenangan inspektorat)	1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 3 dalam Program SDM) 2) Penyusunan rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 8 dalam Program SDM) 3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP 4) Penerapan SPIP 5) Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM) 6) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD 7) Sosialisasi tertib administrasi keuangan 8) Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD 9) Sosialisasi LHKPN 10) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat

n
4
f

Program	Kegiatan
	11) Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN 12) Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN 13) Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN 14) Monitoring 15) Evaluasi 16) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 17) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
3. Penataan Tatalaksana	1) Pemetaan proses penyelenggaraan pemerintahan 2) Penyusunan mekanisme kerja antar SKPD 3) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan) 4) Penyusunan pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik 5) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih 6) Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi (termasuk penyempurnaan e-audit) 7) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk e-audit) 8) Penerapan keterbukaan informasi publik 9) Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor 10) Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis 11) Penyusunan rencana penambahan akses internet gratis 12) Kerjasama dengan pihak berkepentingan untuk pembukaan akses internet gratis 13) Pembukaan akses internet gratis baru 14) Monitoring 15) Evaluasi 16) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 17) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Tatalaksana Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 18) Penyusunan Standar Pelayanan

12
6/1/1

	Program	Kegiatan
4.	Penguatan Akuntabilitas	1) Review rencana strategis pemerintah daerah 2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja untuk tahun berikutnya 3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja 4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja 5) Pelaksanaan manajemen kinerja 6) Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 7) Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja 8) Monitoring 9) Evaluasi 10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana) 2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan 3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat 4) Pengkajian penerapan PTSP 5) Pengembangan PTSP 6) Penerapan teknologi informasi 7) Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi internasional) 8) Monitoring 9) Evaluasi 10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
6.	Quick Wins	1) Pilot Project Penerapan PTSP (1). Pengkajian penerapan PTSP (dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan nomor 4) program Peningkatan Kualitas Pelayanan) (2). Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP dalam waktu singkat

2017

	Program	Kegiatan
		(3). Penyusunan rancangan PTSP (menyangkut kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya) (4). Uji coba (5). Penyempurnaan hasil uji coba (6). Sosialisasi (7). Pembukaan PTSP (8). Monitoring (9). Evaluasi (10). Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (11). Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
	2) Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online	(1). Identifikasi user requirement sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online (2). Penyusunan system (3). Ujicoba system (4). Penyempurnaan system (5). Penerapan system (6). Monitoring (7). Evaluasi (8). Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi (9). Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
	3) Penetapan Quick Wins untuk tahun berikutnya	(1). Identifikasi pelayanan strategis yang dapat dijadikan Quick Wins tahun berikutnya. (2). Perancangan Quick Wins untuk pelayanan strategis yang dipilih (3). Ujicoba (4). Penyempurnaan hasil Ujicoba (5). Sosialisasi (6). Penerapan (7). Monitoring (8). Evaluasi (9). Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (10). Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
7.	Zona Integritas	(1). Penyiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; (2). Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; (3). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (4). Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya (5). Monitoring (6). Evaluasi

1
6
1

	Program	Kegiatan
		(7). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
8.	Manajemen Perubahan	Disusun secara terpisah dalam rencana manajemen perubahan
9.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan hingga tahun 2019
10.	Penguatan dan Penataan Organisasi	

4. Prioritas SKPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing SKPD diserahkan pada masing-masing yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi SKPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

D. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Handwritten blue mark resembling a stylized '7' or 't' with a checkmark-like shape above it.

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap dua minggu sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala SKPD secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala SKPD;

3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.

2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala SKPD.
3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten memantau pelaksanaan tindak lanjut.

Bab V

PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 2015 – 2019 merupakan dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 2015 – 2019 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2015

FF

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab / SKPD terkait	Anggaran						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1.	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur 1) Penyusunan Analisis Jabatan	Dokumen analisis jabatan 1 Dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan Anjab b. Pelaksanaan Anjab c. Penyusunan Hasil anjab d. Penerapan hasil pada jabatan e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindaklanjut hasil evaluasi															Pokja SDM Bagian Organisasi					
2)	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Dokumen analisis beban kerja 1 Dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan ABK b. Pelaksanaan ABK c. Penyusunan Hasil ABK d. Penerapan hasil pada jabatan dan kebutuhan pegawai e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindaklanjut hasil evaluasi															Pokja SDM Bagian Organisasi					
3)	Penyusunan standar kompetensi jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan 1 dokumen	a. Penyusunan rencana penyempurnaan kompetensi jabatan b. Pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan c. Penyusunan hasil d. Penerapan hasil pada jabatan e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindaklanjut hasil evaluasi															Pokja SDM Bagian Organisasi					
4)	Penyusunan rencana pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan	Dokumen rencana kebutuhan pegawai 1 dokumen	a. Penyusunan rencana Pelaksanaan pegawai b. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD					

eftr

No	Program/Kegiatan (termasuk tenaga auditor, teknis, guru dan kesehatan)	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			c. Penerapan hasil pada rekrutmen d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	5) Penyusunan evaluasi jabatan	Dokumen evajab 1 dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan evaluasi jabatan b. Pelaksanaan penyusunan evajab c. Penyusunan hasil evajab d. Monitoring dan evaluasi e. Tindak lanjut															Pokja SDM Bagian Organisasi
	6) Pembangunan/pengembangan database pegawai	Sistem Pegawai 1 Sistem	a. Penyusunan rencana penyempurnaan database pegawai b. Kajian penyempurnaan sistem c. Penyusunan database pegawai d. Uji coba															Pokja SDM Bagian Organisasi
	7) Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru	% CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 80%	a. Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi															Pokja SDM BKD
	8) Penerapan sistem terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	% pejabat yang direkrut dengan kompetensi yang dibutuhkan 80%	a. Penyusunan rencana penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka c. Penerapan sistem dalam lingkup internal Pemda d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi															Pokja SDM BKD

o f r

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
9)	Pelaksanaan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai	% pegawai yang di assess 70%	a. Penyusunan rencana assessment															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD			
			b. Pelaksanaan assessment																		
			c. Penyusunan hasil assessment																		
			d. Penggunaan hasil assessment untuk pengelolaan SDM																		
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																		
			f. Evaluasi																		
			g. Tindaklanjut hasil evaluasi				2016														
			g. Tindaklanjut hasil evaluasi																		
10)	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	% Kesejahteraan Pegawai 75 %	a. Penyusunan rencana kebijakan															Pokja SDM BPKAD dan BKD			
			b. Pelaksanaan kebijakan																		
			c. Monitoring dan evaluasi																		
			d. Tindak Lanjut				2016														
11)	Penyusunan training need (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)	Dokumen rencana pengembangan pegawai 1 dokumen	a. Penyusunan rencana penyusunan kebutuhan pengembangan pegawai															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD			
			b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pegawai																		
			a. Penyusunan rencana penyusunan Rencana penempatan dan pola karier pegawai																		
			b. Penyusunan Rencana penempatan dan pola karier pegawai																		
			c. Penerapan rencana penempatan dan pola karier																		
			d. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier																		
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																		
			f. Evaluasi																		
12)	Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai sesuai dengan kompetensi dan aturan	Dokumen rencana penempatan dan pola karier 1 dokumen	a. Penyusunan rencana penyusunan Rencana penempatan dan pola karier pegawai															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD			
			b. Penyusunan Rencana penempatan dan pola karier pegawai																		
			c. Penerapan rencana penempatan dan pola karier																		
			d. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier																		
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																		
			f. Evaluasi																		
			g. Tindaklanjut hasil evaluasi				2016														
			g. Tindaklanjut hasil evaluasi																		
13)	Penyusunan manajemen pegawai	Sistem manajemen kinerja 1 sistem	a. Penyusunan rencana penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD			
			b. Penyusunan Sistem Manajemen kinerja pegawai																		

u r r

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait BKD	Anggaran				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
14)	Penerapan manajemen pegawai sistem kinerja pegawai	% SKPD yang menerapkan Sistem 100%	c. Uji coba															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD			
			d. Penyempurnaan hasil uji coba																		
			a. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai																		
			b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																		
			c. Evaluasi																		
				2016																	
15)	Sosialisasi kebijakan kepegawaian ASN dan merencanakan penerapannya	Jumlah sosialisasi 3 kali	a. Penyusunan rencana sosialisasi															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD			
			b. Pelaksanaan sosialisasi																		
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																		
			d. Evaluasi																		
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																		
				2016																	
15)	Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku	Jumlah kebijakan baru dilaksanakan Disesuaikan dengan kebijakan yang terbit Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya	a. Penyusunan rencana penerapan															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD			
			b. Penerapan (setelah sosialisasi)																		
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																		
			d. Evaluasi																		
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																		
				2016																	
16)	Penyusunan Rencana pengembangan kepribadian role model	% Pejabat yang memperoleh pengembangan kepribadian 100%	a. Penyusunan rencana pengembangan kepribadian role model															Pokja SDM dan BKD			
			b. Pelaksanaan pengembangan role model bagi para pejabat																		
			c. Penerapan role model bagi seluruh pejabat																		

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindaklanjut hasil evaluasi																	
	17) Pengakuan disiplin pegawai termasuk pemberian reward dan punishment	Pegawai yang memperoleh	a. Penyusunan rencana penerapan b. Penerapan (Setelah melalui sosialisasi) c. Monitoring dan evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi														Pokja SDM dan BKD			
	18) Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM b. Tindak lanjut hasil monitoring															Pokja Manajemen perubahan Bagian Organisasi dan BKD		
	19) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM																	
	20) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program SDM																	
	21) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang diindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya																Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD	

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab / SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2.	Penguatan Pengawasan 1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor dengan (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 4 dalam Program SDM) 2) Pelaksanaan evaluasi laporan kinerja tahunan SKPD 3) Penyusunan rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 dalam Program SDM) 4) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP 5) Penerapan SPIP	Hasil evaluasi SAKIP SKPD Kategori penilaian CC	a. Penyusunan rencana evaluasi b. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian SAKIP SKPD c. Monitoring dan Evaluasi d. Tindak Lanjut	2016												Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten dan BKD Inspektorat Kabupaten				
				Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur																
	4) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP 5) Penerapan SPIP	% SKPD yang menerapkan SPIP 70% % SKPD yang menerapkan SPIP 70%	a. Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP b. Sosialisasi a. Penerapan SPIP di SKPD b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi	2016												Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten dan BKD Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten dan SKPD Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten dan				
				Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 9 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur																

u f r

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait SKPD	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			d. Tindaklanjuti hasil evaluasi														
6)	Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD	Opini BPK WTP	Penyusunan rencana monitoring														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten dan SKPD
7)	Sosialisasi tertib administrasi keuangan	Opini BPK WTP	Sosialisasi tertib administrasi														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten dan BPKAD
8)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD	Opini BPK WTP	a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD b. Tindak lanjut hasil monitoring														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten dan BPKAD, SKPD
9)	Sosialisasi LHKPN	Prosentase pejabat yang menyerahkan LHKPN 80%	Sosialisasi LHKPN														
10)	Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Prosentase pejabat yang menyerahkan LHKPN 80%	a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat b. Monitoring penyerahan LHKPN														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten dan Bagian humas, organisasi
11)	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi ditindaklanjuti indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 70%	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN														

0 A T R

No	Program/Kegiatan	Indikator Target		Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
12)	Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan berhasil ditindaklanjuti 70%		Penerapan sarana pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten	
13)	Tindak pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan berhasil ditindaklanjuti 70%		Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten	
14)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%		a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring b. Tindak lanjut hasil monitoring															Pokja Manajemen perubahan Bagian Organisasi dan Tataaksana Inspektorat Kabupaten	
15)	Penerapan <i>wistle blower</i>	% pengaduan berhasil ditindaklanjuti 70% (jika ada pengaduan yang masuk)		a. Penyusunan rencana penerapan <i>wistle blower</i> b. Penyusunan pedoman pelaksanaan <i>wistle blower</i> c. Sosialisasi d. Penerapan <i>wistle blower</i> e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten	
16)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%		Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan															Pokja Manajemen perubahan Bagian Organisasi dan Inspektorat Kabupaten	
17)	Tindak lanjut hasil evaluasi	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%		a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi															Pokja Akuntabilitas	

4777

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	target 80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program penguatan pengawasan														dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten dan SKPD	
18)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-prioritas sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan Pemerintah di Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten SKPD	
3.	Penataan Tataaksana 1) Penyusunan mekanisme kerja antar SKPD	Persentase kasus tindak fungsi tugas dan fungsi yang diselesaikan	a. Penyusunan mekanisme kerja antar SKPD (proses bisnis) atas dasar hasil pemetaan dan penataan organisasi (disinergikan dengan kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi) b. Penerapan mekanisme kerja c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi														Pokja Penataan Kelembagaan dan Bagian Organisasi	
	2) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)	Prosentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	a. Penyusunan rencana perbaikan SOP di masing-masing SKPD b. Penyusunan SOP di SKPD c. Penerapan SOP di SKPD d. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi hasil penerapan f. Tindak lanjut hasil evaluasi														Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Bagian Organisasi dan SKPD	

0 / 1 / 2

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3)	Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi (termasuk penyempurnaan e-audit, E-LAKIP, E-Formasi)	Prosentase jenis pelayanan publik sudah menerapkan teknologi informasi 40%	Penyusunan/ penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi (termasuk penyempurnaan e-audit)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo SKPD	
4)	Pelaksanaan dan pengembangan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk e-audit dan e-procurement)	Prosentase jenis pelayanan publik sudah menerapkan teknologi informasi 40%	a. Identifikasi user requirement untuk semua jenis pelayanan yang akan dibuatkan sistemnya b. Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (fokus pada e-audit dan e-procurement, serta pengembangan sistem pelayanan terpadu untuk PTSP : e-service) c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo Bagian Humas dan SKPD	
5)	Penerapan keterbukaan informasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik 70%	a. Penerapan keterbukaan informasi publik b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi hasil penerapan d. Tindak lanjut hasil evaluasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo Bagian Humas dan SKPD	
6)	Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor dan jabatan.	Prosentase fasilitas kerja yang distandarisasikan 70%	a. Penyusunan rencana pembuatan pedoman standarisasi fasilitas kantor b. Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Bagian	

2/1/17

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2)	Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja CC	a. Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja b. Penerapan sasaran indikator kinerja dan penetapan kinerja yang sudah direview c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi														Kabupaten Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Bappeda Bagian Organisasi dan Tata Laksana Inspektorat Kabupaten	
3)	Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja CC	Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Bappeda Bagian Organisasi dan Tata Laksana Inspektorat Daerah	
4)	Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan pemerintah dan perancangan kinerja tahunan	Nilai akuntabilitas kinerja CC	a. Penyusunan rencana laporan kinerja b. Pelaksanaan penyusunan laporan c. Monitoring Evaluasi d. Tindak lanjut														Pokja dan Bagian Organisasi dan SKPD	
5)	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja CC	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Bappeda Bagian Organisasi dan Tata Laksana Inspektorat Daerah	
6)	Pelaksanaan manajemen kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	a. Pelaksanaan manajemen kinerja														Pokja Akuntabilitas dan	

g r t r

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		CC	<ul style="list-style-type: none"> b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi hasil penerapan d. Tindak lanjut hasil evaluasi 																	
7)	Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)	Prosentase pegawai yang capaian kerjanya sesuai target 70%	<ul style="list-style-type: none"> a. Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai) b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi hasil penerapan d. Tindak lanjut hasil evaluasi 																	
8)	Pengumpulan, dan pengelolaan data kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana Pengumpulan, perubahan, dan pengelolaan data kinerja 																	
		B	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengumpulan, perubahan, dan pengelolaan data kinerja c. Monitoring Pengumpulan, perubahan, dan pengelolaan data kinerja dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi 																	
9)	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dokumen hasil IKU	a. Penyusunan rencana IKU																	

0/1/12

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
10)	Monitoring dan tindaklanjut monitoring kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	1 dokumen % kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	b. Pelaksanaan penyusunan IKU a. Monitoring terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas b. Tindaklanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas															Pokja Manajemen perubahan Bagian Orgnaisasi dan Tataaksana Inspektorat Kabupaten	
11)	Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas															Pokja Manajemen perubahan Bagian Orgnaisasi Inspektorat Kabupaten	
12)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindaklanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Penguatan Akuntabilitas															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Bappeda Bagian Organisasi Inspektorat Kabupaten dan BKD serta SKPD	
13)	Sosialisasi Perda dan Perbup	Jumlah Sosialisasi 3 Kali	a. Penyusunan rencana sosialisasi b. Pelaksanaan Sosialisasi c. Monitoring dan Evaluasi d. Tindak Lanjut															Pokja dan Bagian Hukum	
14)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-prioritas dimaksud	% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Bappeda Bagian	

5/1/16

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas Aparatur di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	100%	b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya																
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan 1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 70%	a. Penyusunan rencana survey kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan b. Penyusunan instrumen survey dan uji cobanya c. Pelaksanaan survey d. Pengolahan data dan analisis hasil survey e. Penyusunan rekomendasi																
	2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 70%	a. Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan																
	3) Penyusunan Laporan SPM	Pencapaian target SPM 50%	a. Penyusunan Rencana Laporan SPM b. Pelaksanaan Laporan SPM c. Monitoring dan Evaluasi d. Tindak Lanjut																
	4) Penyusunan rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya,	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya	e. Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan sesuai dengan rekomendasi dan identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan																

o / k / r

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	perubahan perilaku pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan daerah yang dianggap menghambat	70%	f. Penyusunan kerangka peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : pemyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat																
5)	Pengkajian penerapan PTSP	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya 70%	a. Pengkajian penerapan PTSP															Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi, BPMPT dan SKPD	
6)	Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	Dokumen Hasil SP 1 dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan SP b. Pelaksanaan Penyusunan SP c. Monitoring dan Evaluasi d. Tindak Lanjut e. a. Penerapan PTSP hasil rumusan (sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 4) sebagai Quick wins															Pokja dan Bagian Organisasi	
7)	Pengembangan PTSP untuk Quick Wins	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya																Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan Tata	

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		70%	b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi															
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 70%	a. Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi pada sistem pelayanan (diselaraskan dengan kegiatan nomor 5 dan 6 Program Penataan Tataletaksana) b. Identifikasi user requirement c. Uji coba system d. Penerapan teknologi informasi pada jenis pelayanan yang masuk PTSP dan menjadi quick wins) e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi															
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 70%	a. Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan sesuai dengan kerangka peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 2 b. Monitoring dan tindak lanjut perbaikan manajemen pelayanan c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi															
8)	Penerapan teknologi informasi																	
9)	Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan penyusunan pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengadaan, dan sertifikasi internasional)																	
10)	Penilaian dan Penyiapan sarana pelayanan publik 30 SKPD	Hasil Penilaian Zona Hijau	a. Penyusunan rencana b. Pelaksanaan penilaian c. Monitoring dan Evaluasi d. Tindak Lanjut															

u a t r

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait dan Kominfo serta Inspektorat Kabupaten.	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	masyarakat		c. Monitoring dan Evaluasi d. Tindak Lanjut														
6.	Quick Wins 1) Pilot Project Pengembangan Pelayanan Perizinan dan non perizinan berbasis online	(1). Identifikasi user requirement pelayanan dan non perizinan berbasis online Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 70%	Identifikasi user requirement sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online														
	(2). Penyusunan sistem	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi 70%	Penyusunan sistem														
	(3). Ujicoba sistem	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi 70%	Ujicoba sistem														
	(4). Penyempurnaan sistem	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi 70%	Penyempurnaan sistem														
	(5). Penerapan sistem	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi 70%	Penerapan sistem														
	(6). Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring pelaksanaan sistem														

9/1/12

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		90%	b. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring																
(7).	Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	Evaluasi terhadap penerapan sistem															Pokja Manajemen Perubahan Dnas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kominfo	
(8).	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi	% penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi b. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya															Pokja Pelayanan Publik Dnas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kominfo	
2) Penerapan PTSP																			
(1).	Pengkajian penerapan PTSP (dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan nomor 5) program Peningkatan Kualitas Pelayanan)			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik															
(2).	Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP dalam waktu singkat			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik															
(3).	Penyusunan rancangan PTSP (menyangkut kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, diskresi, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana			Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik															

**Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2016**

K t n

07/1/16

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1) Penyempurnaan Hasil Evaluasi jabatan	Dokumen hasil evaluasi jabatan 1 dokumen	a. Penyempurnaan Hasil EVJAB															Pokja dan Bagian Organisasi		
			b. Pelaksanaan evaluasi jabatan																	
			c. Penyusunan hasil evaluasi jabatan																	
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			e. Evaluasi																	
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
2)	Penyempurnaan dan penerapan hasil Analisis Jabatan	Dokumen hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan 1 Dokumen	a. Penyempurnaan Hasil analisis jabatan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD		
			b. Penerapan hasil penyempurnaan pada jabatan																	
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			d. Evaluasi																	
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
			f. Penyempurnaan hasil ABK sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan																	
3)	Penyempurnaan dan penerapan Hasil Analisis beban Kerja	Dokumen hasil analisis beban kerja yang sudah disempurnakan 1 Dokumen	a. Penyempurnaan hasil jabatan dan kebutuhan pegawai															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD		
			b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			c. Evaluasi																	
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
			e. Penyempurnaan standar jabatan sudah																	
			f. Penerapan hasil pada																	

0112

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait BKD	Anggaran				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		disempurnakan 1 dokumen	jabatan																		
		1 dokumen	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi																		
		Dokumen job grading	e. Tindak lanjut hasil evaluasi																		
		1 dokumen	a. Penyusunan rencana penyusunan job grading b. Penyusunan job grading untuk seluruh jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring penyusunan job grading d. Penerapan hasil job grading pada penentuan sistem penggajian e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi																		
				2017																	
6)	Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir)	Dokumen kebutuhan pegawai yang sudah disempurnakan 1 dokumen	a. Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir) b. Penerapan hasil pada rekrutmen c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi																Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD		
7)	Lanjutan pengembangan database pegawai	Sistem 1 Sistem	a. Penyempurnaan database pegawai b. Uji coba sistem baru																	Pokja dan BKD BKD	
8)	Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru (tahun 2016)	% CPNS yang direkrut dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru																		

6/12

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		85%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi																		
			d. Tindaklanjuti hasil evaluasi	2017																	
9)	Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	% pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penyempurnaan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka c. Penerapan sistem dalam lingkup internal dan eksternal Pemda d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindaklanjuti hasil evaluasi																Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD		
10)	Review penggunaan hasil assessment kompetensi untuk pengelolaan SDM	% pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Review penggunaan hasil assessment kompetensi untuk pengelolaan SDM b. Penggunaan hasil assessment untuk pengelolaan SDM c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindaklanjuti hasil evaluasi																	Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD	
11)	Peningkatan kesejahteraan pegawai	% kesejahteraan pegawai	a. Pelaksanaan kebijakan b. Monitoring dan evaluasi c. Tindak Lanjut																	Pokja SDM, dan BKD	
12)	Penyusunan training need (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)	Dokumen pengembangan pegawai	a. Penyusunan rencana pengembangan pegawai b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pegawai	2017																	
		1 dokumen		Sudah disusun tahun 2015																	
				Sudah disusun tahun 2015																	

u k f r

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tabapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
13)	Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru, teknis dan kesehatan)	% pegawai yang mengikuti pengembangan pegawai 20%	a. Pelaksanaan pengembangan pegawai diklat															Pokja SDM BKD		
			b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan pengembangan pegawai																	
			c. Evaluasi																	
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
14)	Penerapan rencana penempatan dan pola karier pegawai sesuai dengan kompetensi dan aturan	% pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 85%	a. Penerapan rencana penerapan dan sistem pola karier pada Sistem Manajemen SDM															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD		
			b. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier																	
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			d. Evaluasi																	
15)	Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai	Sistem manajemen kinerja 1 sistem	e. Tindak lanjut hasil evaluasi															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD		
			a. Penyusunan rencana sistem manajemen kinerja pegawai																	
			b. Penyusunan Sistem Manajemen kinerja pegawai																	
			c. Uji coba																	
16)	Lanjutan Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai	% SKPD yang menerapkan Sistem 100%	d. Penyempurnaan hasil uji coba															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD		
			a. Penerapan manajemen kinerja pegawai																	
			b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			c. Evaluasi																	
17)	Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian ASN dan merencanakan penerapannya	Jumlah sosialisasi	d. Tindak lanjut hasil evaluasi															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD		
			a. Penyusunan rencana sosialisasi																	

Sudah disusun tahun 2015

2017

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		3 kali	b. Pelaksanaan sosialisasi c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindaklanjut hasil evaluasi																	
18)	Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku	Jumlah kebijakan baru yang dilaksanakan Disesuaikan dengan kebijakan yang terbit	a. Penyusunan rencana penerapan b. Penerapan (setelah melalui sosialisasi) c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindaklanjut hasil evaluasi															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD		
19)	Lanjutan Pelaksanaan pengembangan kepribadian role model	% Pejabat yang memperoleh pengembangan kepribadian 100%	a. Lanjutan Pelaksanaan pengembangan role model bagi para pejabat b. Penerapan role model bagi seluruh pejabat c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindaklanjut hasil evaluasi																Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD	
20)	Penegakan disiplin pegawai, pemberian reward dan punishment	% Pegawai yang memperoleh %	a. Penyusunan rencana kegiatan b. Pelaksanaan c. Monitoring dan Evaluasi d. Tindak Lanjut																Pokja SDM dan BKD	
21)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM b. Tindak lanjut hasil monitoring																Pokja Manajemen perubahan Bagian Organisasi dan BKD	

9/1/12

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
22)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi pelaksanaan kegiatan program SDM terhadap seluruh kegiatan program SDM														Pokja Manajemen perubahan Bagian Organisasi dan BKD	
23)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM yang telah dilakukan pada tahun 2014	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2014 b. Perbaikan kegiatan-program SDM yang telah dilaksanakan pada tahun 2014														Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD	
24)	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2014	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2014														Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD	
25)	Penyusunan prioritas baru tahun 2016 serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan pada tahun 2016 sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD	
2.	Penguatan Pengawasan																	
1)	Review penyempurnaan rencana kebutuhan tenaga auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 6 dalam Program SDM)		Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 6 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten dan BKD	
2)	Review rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 12 dalam Program SDM)		Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur															

0 x 1 2

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015														
3)	Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP	% SKPD yang menerapkan SPIP	a. Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP															
		80%	b. Sosialisasi															
4)	Lanjutan Penerapan SPIP pada SKPD yang belum melaksanakan/belum optimal melaksanakan	% SKPD yang menerapkan SPIP	a. Lanjutan Penerapan SPIP di SKPD															
		80%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi															
			d. Tindaklanjut hasil evaluasi tahun 2014															
5)	Lanjutan Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 13 Program SDM)	Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 13 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur																
6)	Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD untuk tahun 2015	Opini BPK	Penyusunan monitoring															
		WTP																
7)	Sosialisasi tertib administrasi keuangan	Opini BPK	Sosialisasi administrasi															
		WTP	tertib															
8)	Pelaksanaan evaluasi (Review) Laporan Kinerja Tahunan SKPD	Hasil evaluasi SAKIP	a. Penyusunan rencana evaluasi															
		Nilai B	b. Pelaksanaan dan review															
			c. Monitoring dan evaluasi															
			d. Tindak Lanjut															
9)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD tahun 2015	Opini BPK	a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD															
		WTP	b. Tindak lanjut hasil monitoring															
10)	Sosialisasi LHKPN	Prosentase pejabat telah menyerahkan LHKPN	Sosialisasi LHKPN	Sudah dilaksanakan tahun 2015														
		95%																
11)	Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Prosentase pejabat telah menyerahkan LHKPN	a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Sudah dilaksanakan tahun 2015														
		80%	b. Monitoring penyerahan LHKPN															

2/1/15

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
				Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015															
12)	Penyusunan pengembangan pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti 70%	Penyusunan rencana sarana pengembangan pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten, Bagian Humas dan Organisasi	
13)	Lanjutan Pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti 70%	Penerapan pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN																
14)	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 75%	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN																
15)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan tahun 2015	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring b. Tindak lanjut hasil monitoring																
16)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan tahun 2015	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan															Pokja Manajemen perubahan Bagian Organisasi dan Inspektorat Kabupaten	
17)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan tahun 2014	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi b. Perbaikan kegiatan-program penguatan pengawasan															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten dan SKPD	
18)	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2014	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2014																
19)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan pelaksanaan	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten dan SKPD	

2/1/12

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab / SKPD terkait	Anggaran					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
5)	Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan teknologi informasi	Prosentase jenis pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi 50%	c. Monitoring dan tindak lanjut monitoring hasil															Dinas Kominfo, BPMPT dan SKPD				
			d. Evaluasi																			
			e. Tindak lanjut evaluasi 2014																			
			a. Identifikasi user requirement untuk semua jenis pelayanan yang akan dibuatkan sistemnya																	Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana		
			b. Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan																	Dinas Kominfo dan SKPD		
			c. Uji coba Sistem																			
6)	Lanjutan Penerapan keterbukaan informasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik 80%	d. Monitoring uji coba dan tindak lanjut hasil monitoring																			
			e. Evaluasi uji coba penerapan																			
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi uji coba penerapan																			
			a. Penerapan keterbukaan informasi publik																		Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana	
			b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring																		Dinas Kominfo Bagian Humas dan SKPD	
			c. Evaluasi hasil penerapan																			
7)	Penerapan pedoman standarisasi fasilitas kantor dan jabatan.	Prosentase fasilitas kerja yang distandarisasikan 75%	d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2015																			
			a. Penerapan standarisasi fasilitas kantor																	Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana		
			b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring																		Bagian Organisasi dan BPKAD	
			c. Evaluasi hasil penerapan																			
8)	Identifikasi tempat-tempat	Jumlah lokasi dengan rencana	d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2015																			
			a. Penyusunan rencana																	Pokja Penataan		

ETN

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis (fokus di wilayah pedesaan)	akses internet gratis	Identifikasi tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis di wilayah pedesaan														Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo Bagian Humas	
		15	b. Identifikasi tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis di wilayah pedesaan															
9)	Kerjasama dengan pihak berkepentingan untuk pembukaan akses internet gratis di wilayah pedesaan	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis 15	Kerjasama dengan pihak berkepentingan untuk pembukaan akses internet gratis di wilayah pedesaan														Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo Bagian Humas	
10)	Pembukaan akses internet gratis baru di wilayah pedesaan	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis 15	a. Sosialisasi dan akses internet gratis di di wilayah pedesaan b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring														Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo Bagian Humas	
11)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penataan Tatalaksana tahun 2015	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring b. Tindak lanjut hasil monitoring														Pokja Manajemen perubahan Bagian Organisasi dan Inspektorat Kabupaten	
12)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Tatalaksana tahun 2015	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan														Pokja Manajemen perubahan Bagian Orghnaisasi dan Inspektorat Kabupaten	
13)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penataan Tatalaksana 2014 -	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi														Pokja Penataan Kelembagaan dan	

0.1.1.1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	2015	80%	b. Perbaikan kegiatan program Penataan Tatalaksana															Tatalaksana Dinas Kominfo Bagian Humas dan Organisasi		
14)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo Bagian Humas		
4.	Penguatan Akuntabilitas																			
1)	Review rencana strategis pemerintah daerah	Nilai kinerja B	a. Penyusunan rencana review renstra dan perbaikannya b. Review rencana strategis pemerintah daerah																Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Bappeda	
2)	Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja	Nilai kinerja B	a. Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja b. Penerapan sasaran indikator kinerja dan penetapan kinerja yang sudah direview c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2015 - 2016																Bagian Organisasi dan Tata Laksana Inspektorat Daerah	
3)	Penyusunan laporan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahunan instansi pemerintah	Nilai B	a. Penyusunan rencana laporan kinerja b. Pelaksanaan laporan kinerja c. Monitoring dan evaluasi d. Tindak Lanjut																Pokja, bagian organisasi dan SKPD	
																				2017

e f r

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
		B	<p>b. Pengumpulan, dan pengelolaan data kinerja</p> <p>c. Monitoring Pengumpulan, dan pengelolaan data kinerja dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>d. Evaluasi hasil penerapan</p> <p>e. Tindak lanjut hasil evaluasi</p>																							
10)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas 2015	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas																							
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas																							
11)	Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas tahun 2015	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas																							
		80%																								
12)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2014 - 2015	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas																							
		80%	b. Perbaikan kegiatan program Penguatan Akuntabilitas																							
13)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas Aparatur di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi																							
		100%	b. Penyusunan prioritas																							
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan																							
			d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya																							

6/12

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan 1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 80%	a. Penyusunan rencana survey masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan														Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan Humas SKPD			
			b. Penyusunan/penyempurnaan instrumen survey dan uji cobanya																	
			c. Pelaksanaan survey																	
			d. Pengolahan data dan analisis hasil survey																	
			e. Penyusunan rekomendasi																	
	2) Identifikasi kebutuhan manajemen pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 80%	Identifikasi kebutuhan manajemen pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan																	
	3) Penyusunan rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 80%	a. Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan sesuai dengan rekomendasi dan identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan b. Penyusunan kerangka peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat																	
				Sudah dilaksanakan tahun 2015																

E T R

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
4)	Penyusunan laporan SPM	Capaian target 60 %	a. Penyusunan laporan rencana															Pokja Bagian Organisasi dan SKPD			
			b. Pelaksanaan laporan SPM																		
			c. Monitoring dan evaluasi																		
			d. Tindak lanjut																		
5)	Pengkajian penerapan PTSP	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 80%	a. Pengkajian penerapan PTSP	Sudah dilaksanakan tahun 2015																	
			b. Penyusunan kerangka sistem PTSP	Sudah dilaksanakan tahun 2015																	
			c. Penyusunan rencana penerapan	Sudah dilaksanakan tahun 2015																	
			d. Penerapan PTSP sesuai rencana	Sudah dilaksanakan tahun 2015																	
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan	Sudah dilaksanakan tahun 2015																	
			f. Evaluasi	Sudah dilaksanakan tahun 2015																	
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi	Sudah dilaksanakan tahun 2015																	
			a. Lanjutan Penerapan PTSP sebagai Quick wins	Sudah dilaksanakan tahun 2015																	
6)	Lanjutan pelaksanaan PTSP untuk Quick Wins	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 80%	a. Lanjutan Penerapan PTSP sebagai Quick wins															Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan BPMPT SKPD			
			b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																		
			c. Evaluasi																		
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi																		
			a. Penyusunan rencana pengembangan PTSP untuk seluruh jenis pelayanan administratif																		
			b. Penyediaan PTSP (sistem, mekanisme kerja, penggunaan teknologi informasi, SDM, sarana dan prasana, dst)																		
			c. Pelaksanaan PTSP																		
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil																		
7)	Pengembangan PTSP (quick wins) untuk seluruh jenis pelayanan administratif	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 80%	a. Penyusunan rencana PTSP untuk seluruh jenis pelayanan administratif																		
			b. Penyediaan PTSP (sistem, mekanisme kerja, penggunaan teknologi informasi, SDM, sarana dan prasana, dst)																		
			c. Pelaksanaan PTSP																		
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil																		

e t f R

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
11)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh program Peningkatan Pelayanan Publik b. Tindak lanjut hasil monitoring seluruh program Peningkatan Pelayanan Publik														Pokja Manajemen Perubahan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Humas	
12)	Penilaian dan penyiapan pelayanan sarana publik kantor camat, UPT dinas/badan	Hasil penilaian Zona Hijau	a. Penyusunan rencana penilaian b. Pelaksanaan Penilaian c. Monitoring dan evaluasi d. Tindak Lanjut														Pokja Bagian Organisasi dan	
13)	Evaluasi terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan Pelayanan Publik														Pokja manajemen perubahan Bagian Organisasi dan Humas	
14)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak hasil evaluasi seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b. Perbaikan pelaksanaan kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2014 - 2015														Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan Humas SKPD	
15)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															
16)	Penerapan media center informasi, pelayanan	% hasil pelayanan	a. Penyusunan rencana media center														Pokja Diskominfo,	

O F R

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	dokumentasi dan pengaduan masyarakat	50 %	b. Penerapan media center c. Monitoring dan evaluasi d. Tindak Lanjut															Penanggung jawab/SKPD terkait Bagian humas, Organisasi dan Inspektorat Kabupaten
6.	Quick Wins 1) Pilot Project Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi perizinan dan non perizinan berbasis online 80%	Identifikasi requirement informasi perizinan dan non perizinan berbasis online user sistem pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online															Pokja Pelayanan Publik BPMPT dan Dinas Kominfo
	(1). Identifikasi user requirement pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online																	Sudah dilakukan tahun 2015
	(2). Penyusunan sistem	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi perizinan dan non perizinan berbasis online 80%	Penyusunan sistem															Sudah dilakukan tahun 2015
	(3). Ujicoba sistem	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi perizinan dan non perizinan berbasis online 80%	Ujicoba sistem															Sudah dilakukan tahun 2015
	(4). Penyempurnaan sistem	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi perizinan dan non perizinan berbasis online 80%	Penyempurnaan sistem															Sudah dilakukan tahun 2015

g t r

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya)																
	(4). Uji coba																
	(5). Penyempurnaan hasil uji coba																
	(6). Sosialisasi																
	(7). Lanjutan Penerapan PTSP Quick Wins	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP 80%	Lanjutan Penerapan PTSP														
	(8). Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring														
	(9). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	b. Tindaklanjuti hasil monitoring Evaluasi														
	(10). Pemeliharaan dan pengembangan PTSP Quick Wins untuk jenis-jenis pelayanan yang diperluas (lihat kegiatan nomor 6)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP 70%	Pemerintahan PTSP yang sudah berjalan baik														
			Pengembangan PTSP untuk jenis-jenis pelayanan baru Penerapan PTSP														
7.	Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																
	(1). Penyiapan 3 SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 3	Penyiapan 3 SKPD sebagai unit yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten
	(2). Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 3	Pencanaan Integritas Menuju WBK/WBBM														
	(3). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan SKPD yang baru ditetapkan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda 80%	a. Pelaksana Integritas WBK/WBBM di Dinas Pendidikan dan														

g A T R

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2015		Kebudayaan																
	(4). Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring															Pokja Manajemen Perubahan Inspektorat Kabupaten	
	(5). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	b. Tindak lanjut monitoring Evaluasi																
	(6). Tindak lanjut perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten	
	(7). Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	a. Penyusunan rencana Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya																
		80%	b. Penetapan SKPD untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM																
8.	Penataan Peraturan Perundang-undangan																		
	(1). Lanjutan Penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung penerapan PTSP untuk seluruh pelayanan administratif	% dari Jumlah kebijakan baru yang diterbitkan sebagai pengganti peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan 60%	a. Identifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan dan menghentikan penerapan PTSP																Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan Pokja Pelayanan Publik Pokja Penataan
			b. Penyusunan rencana pembahasan penataan																
				Sudah dilakukan tahun 2015															
				Sudah dilakukan tahun 2015															

5717

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			<p>c. Lanjutan Perumusan kebijakan perubahan untuk peraturan yang dipandang menghambat pelayanan menghambat penerapan PTSP</p> <p>d. Penetapan kebijakan</p> <p>e. Implementasi</p>															
	(2). Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	% aktivitas penerapan sistem dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring															
	(3). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem dilaksanakan sesuai target 90%	b. Tindaklanjuti monitoring Evaluasi															
	(4). Tindak lanjut hasil evaluasi	% aktivitas penerapan sistem dilaksanakan sesuai target 90%	Tidaklanjuti terhadap hasil monitoring dan evaluasi															
	(5). Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	<p>Perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam Program Peraturan Perundang-undangan tahun 2014 dan 2015</p> <p>a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi</p> <p>b. Penyusunan prioritas</p> <p>c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan</p> <p>d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya</p>															

6 A F R

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
9.	Penguatan dan Penataan Organisasi 1) Penataan organisasi yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung penerapan PTSP sebagai quick wins	Jumlah organisasi yang ditata 60%	a. Lanjutan Pelaksanaan perubahan kebijakan yang menghambat pelayanan dan menghambat penerapan PTSP														Pokja Penataan Kelembagaan dan Tataaksana Bagian Organisasi dan BPMPT			
			b. Monitoring																	
			c. Tindak lanjut hasil monitoring																	
			d. Evaluasi																	
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
			a. Penyusunan rencana penataan terhadap tugas dan fungsi dengan dasar hasil pemetaan proses bisnis																	
	2) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih diselesaikan	Persentase tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan 80%	b. Perumusan penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih (termasuk menata kelembagaan)														Pokja Penataan Kelembagaan dan Tataaksana Bagian Organisasi dan SKPD			
			c. Penerapan hasil penataan																	
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			e. Evaluasi																	
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi																	

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2017

f f n

u A T R

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab / SKPD terkait	Anggaran				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
5)	Penyempurnaan job grading	Dokumen job grading yang disempurnakan 1 dokumen	d. Evaluasi																		
			e. Tindaklanjuti hasil evaluasi																		
			a. Penyusunan rencana penyempurnaan job grading																		
			b. Penyempurnaan job grading untuk seluruh jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan																		
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring penyempurnaan job grading																		
6)	Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir)	Dokumen rencana kebutuhan pegawai yang sudah disempurnakan 1 dokumen	d. Penerapan hasil job grading pada penentuan sistem penggajian															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD			
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																		
			f. Evaluasi																		
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 dan 2017																		
			a. Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir)																		
7)	Lanjutan pengembangan database pegawai	Sistem 1 sistem	b. Penerapan hasil pada rekrutmen															Pokja dan BKD			
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																		
			d. Evaluasi																		
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017																		
			a. Penyempurnaan database pegawai																		
8)	Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru	% CPNS yang direkrut dengan kompetensi yang dibutuhkan	b. Uji coba sistem baru															BKD			
			a. Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru																		

DAFTAR

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		target	kegiatan program SDM																	
	23) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM yang telah dilakukan pada tahun 2015	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2015 b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program SDM yang telah dilaksanakan pada tahun 2017															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD		
	24) Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2017	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2018																	
	25) Penyusunan prioritas baru tahun 2018 serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan pada tahun 2019 sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya																Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD	
2.	Penguatan Pengawasan																			
	1) Review penyempurnaan rencana kebutuhan tenaga auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 6 dalam Program SDM)		Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 6 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur																Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten BKD	
	2) Review rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 11 dalam Program SDM)		Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 11 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur																	

oktr

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
				Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015															
3)	Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP	% SKPD yang menerapkan SPIP 70%	a. Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP b. Sosialisasi															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten SKPD	
4)	Lanjutan Penerapan SPIP pada SKPD yang belum melaksanakan/belum optimal melaksanakan	% SKPD yang menerapkan SPIP 100%	a. Lanjutan Penerapan SPIP di SKPD b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindaklanjut hasil evaluasi tahun 2015 dan 2016															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten BKD	
5)	Lanjutan Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 13 Program SDM)		Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 13 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur																
6)	Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD untuk tahun 2017	Opini BPK WTP	Penyusunan monitoring rencana															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten	
7)	Sosialisasi tertib administrasi keuangan	Opini BPK	Sosialisasi administrasi tertib															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Daerah SKPD	
8)	Pelaksanaan evaluasi (review) laporan kinerja tahunan SKPD	WTP Hasil evaluasi SAKIP Nilai BB	a. Penyusunan rencana evaluasi b. Pelaksanaan evaluasi dan review c. Monitoring dan evaluasi d. Tindak lanjut															Inspektorat Kabupaten	
9)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD tahun 2017	Opini BPK	e. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Daerah	

0412R

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			e. Evaluasi uji coba penerapan																
			f. Tindak lanjut uji coba penerapan																
				2016															
6)	Lanjutan Penerapan keterbukaan informasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik 80%	a. Penerapan keterbukaan informasi publik														Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo Bagian Humas		
			b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring																
			c. Evaluasi hasil penerapan																
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017																
7)	Penerapan pedoman standarisasi fasilitas kantor dan jabatan	Prosentase fasilitas kerja yang distandarisasikan 85%	a. Penerapan standarisasi fasilitas kantor															Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Bagian Organisasi dan BPKAD	
			b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring																
			c. Evaluasi hasil penerapan																
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017																
8)	Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis (fokus di wilayah pedesaan)	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis	a. Penyusunan rencana Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis di wilayah pedesaan															Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo Bagian Humas	
		25	b. Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis di wilayah pedesaan																
9)	Kerjasama dengan pihak untuk akses internet gratis di wilayah pedesaan	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis 25	Kerjasama dengan pihak berkepentingan untuk pembukaan akses internet gratis di wilayah pedesaan															Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo Bagian Humas	
			a. Sosialisasi dan Pembukaan akses internet gratis di wilayah pedesaan																
10)	Pembukaan akses internet gratis baru di wilayah pedesaan	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis	b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil																
		25																	

01/1/2

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2015 - 2016														
3)	Penyusunan laporan kinerja tahunan instansi pemerintah dan perjanjian kinerja tahunan	Nilai akuntabilitas kerja BB	a. Penyusunan rencana laporan kinerja b. Pelaksanaan penyusunan laporan c. Monitoring dan evaluasi d. Tindak lanjut														Pokja Bagian Organisasi dan SKPD
4)	Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja	Nilai kinerja BB	Penyusunan rencana sistem manajemen kinerja	Sudah dilaksanakan tahun 2015													
5)	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja BB	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja	Sudah dilaksanakan tahun 2015													
6)	Lanjutan Pelaksanaan manajemen kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja BB	a. Pelaksanaan manajemen kinerja b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi hasil penerapan d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Bappeda Bagian Organisasi dan Inspektorat Kabupaten SKPD
7)	Penyempurnaan Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)	Prosentase pegawai yang ketercapaian kinerjanya sesuai target 85%	a. Penyempurnaan Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai) b. Penerapan Sistem Manajemen Kinerja yang telah diintegrasikan dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Bappeda Bagian Organisasi dan Inspektorat Kabupaten BKD SKPD

Handwritten marks at the top of the page.

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab / SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
13)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan dengan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas Aparatur di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	<p>Penguatan Akuntabilitas</p> <p>a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi</p> <p>b. Penyusunan prioritas</p> <p>c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan</p> <p>d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya</p>															
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan																	
1)	Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 80%	<p>a. Penyusunan rencana survey kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan</p> <p>b. Penyusunan/penyempurnaan instrumen survey dan uji cobanya</p> <p>c. Pelaksanaan survey</p> <p>d. Pengolahan data dan analisis hasil survey</p> <p>e. Penyusunan rekomendasi</p>															
2)	Identifikasi kebutuhan manajemen pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 70%	Identifikasi kebutuhan manajemen pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan															
3)	Penyusunan rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan yang meliputi : penerapan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu		<p>a. Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan sesuai dengan rekomendasi dan identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan</p>															

Sudah dilaksanakan tahun 2015

0/1/12

No	Program /Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	(PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat	70%	b. Penyusunan kerangka peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat																
4)	Penyusunan Laporan SPM	Capaian target 70 %	a. Penyusunan laporan SPM b. Pelaksanaan Laporan SPM c. Monitoring dan evaluasi d. Tindak lanjut															Pokja Bagian Organisasi dan SKPD	
5)	Pengkajian penerapan PTSP	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 80%	a. Pengkajian penerapan PTSP b. Penyusunan kerangka sistem PTSP c. Penyusunan rencana penerapan d. Penerapan PTSP sesuai rencana e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi, BPMPT dan SKPD			
6)	Lanjutan pelaksanaan PTSP untuk Quick Wins	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 70%	a. Lanjut Penerapan PTSP sebagai Quick wins b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi, BPMPT dan SKPD			
				Sudah dilaksanakan 2015 -2016												Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi, BPMPT dan SKPD			

u ATR

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab / SKPD terkait	Anggaran				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
7)	Pengembangan dan pemeliharaan PTSP untuk seluruh jenis pelayanan administratif	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya 70%	c. Evaluasi lanjut hasil															Humas SKPD			
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi																		
			a. Pelaksanaan PTSP																		
			b. Monitoring dan tindak lanjut monitoring hasil																		
8)	Penerapan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya 70%	c. Evaluasi															Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan Tata Laksana Dinas Kominfo Humas SKPD			
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017																		
			a. Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi pada sistem pelayanan (diselaraskan dengan kegiatan nomor 5 dan 6 Program Penataan Tatalaksana)																		
			b. Identifikasi user requirement																		
			c. Uji coba sistem																		
			d. Penerapan teknologi informasi pada jenis pelayanan yang masuk PTSP dan menjadi quick wins)																		
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																		
			f. Evaluasi																		
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi																		
			a. Pelaksanaan SP																		
9)	Lanjutan penerapan standar pelayanan (SP)	% penerapan 100 %	a. Pelaksanaan SP															Pokja Bagian Organisasi dan			
			b. Monitoring dan Evaluasi																		
			c. Tindak Lanjut																		
10)	Penyempurnaan penerapan media center dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Hasil pelayanan 70%	a. Penerapan media center dan pengelolaan pengaduan masyarakat															Pokja inspektorat kabupaten, Diskominfo, Bagian organisasi, Humas dan			
			b. Monitoring dan evaluasi																		
			c. Tindak lanjut																		

Sudah dilakukan tahun 2015

2018

2018

27/12

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
11)	Lanjutan Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2015	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya	a. Lanjutan Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan sesuai dengan kerangka peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 2															Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi, BFMPT, Diskominfo dan SKPD		
			b. Monitoring dan tindak lanjut perbaikan manajemen pelayanan																	
			c. Evaluasi																	
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 dan 2017																	
12)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik															Pokja Manajemen Perubahan Bagian Organisasi dan Inspektorat Kabupaten		
			b. Tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																	
13)	Evaluasi terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik															Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan Humas SKPD		
			a. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi																	
14)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik															Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan Humas SKPD		
			b. Perbaikan pelaksanaan kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2015 - 2016																	
15)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka target-target prioritas dimaksud sesuai	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi															Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan		

Handwritten signature or initials in blue ink at the top of the page.

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	100%	b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														Humas SKPD	
6.	Quick Wins 1) Pilot Project Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online	Tingkat masyarakat terhadap pelayanan informasi perizinan dan non perizinan online 80%	Identifikasi user requirement sistem pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online														Pokja Pelayanan Publik, BPMPT, Dinas Kominfo	
	(1). Identifikasi user requirement sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online																	
	(2). Penyusunan sistem	Tingkat masyarakat terhadap pelayanan informasi perizinan dan non perizinan online 80%	Penyusunan sistem															
	(3). Ujicoba sistem	Tingkat masyarakat terhadap pelayanan informasi perizinan dan non perizinan online 80%	Ujicoba sistem															
	(4). Penyempurnaan sistem	Tingkat masyarakat terhadap pelayanan informasi perizinan dan non perizinan berbasis	Penyempurnaan sistem															

u A T R

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		online 80%																
(5).	Penerapan sistem	Tingkat kemampuan masyarakat terhadap pelayanan informasi dan perizinan berbasis online	Penerapan sistem	Sudah dilakukan tahun 2016														
(6).	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring pelaksanaan sistem	Sudah dilakukan tahun 2016												Pokja Manajemen Perubahan, BPMPT, Dinas Kominfo		
(7).	Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	b. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring	Sudah dilakukan tahun 2016														
(8).	Pemeliharaan/Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap penerapan sistem															
		90%	a. Pemeliharaan/ pengembangan sistem															
		90%	b. Lanjutan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online															
2)	Penerapan PTSP			Sudah dilakukan tahun 2015												Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan Tata Laksana Humas SKPD		
(1).	Pengkajian penerapan PTSP (dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan nomor 4) program Peningkatan Kualitas Pelayanan)			Sudah dilakukan tahun 2015														
(2).	Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP dalam waktu singkat			Sudah dilakukan tahun 2015														
(3).	Penyusunan rancangan PTSP (menyangkut kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan)			Sudah dilakukan tahun 2015														

RTN

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	kewenangan, diskresi, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya)																	
	(4). Uji coba																	
	(5). Penyempurnaan hasil uji coba																	
	(6). Sosialisasi																	
	(7). Lanjutan Penerapan PTSP Quick Wins	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP 80%	Lanjutan Penerapan PTSP															
	(8). Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring															
	(9). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	b. Tindaklanjutan hasil monitoring Evaluasi															
	(10). Pemeliharaan dan pengembangan PTSP Quick Wins untuk jenis-jenis pelayanan yang diperluas (lihat kegiatan nomor 6)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP 80%	Pemeriharaan PTSP yang sudah berjalan baik Penerapan PTSP															
7.	Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																	
	(1). Penyiapan 20 SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 20	Penyiapan 20 SKPD sebagai unit yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten
	(2). Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 30	Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM															
	(3). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 20 SKPD yang sudah ditetapkan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	a. Pelaksana Integritas WBK/WBBM di SKPD															

07 FR

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab / SKPD terkait	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	sebagai ZI dan SKPD yang baru ditetapkan untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2016	80%	yang sudah menerapkan ZI														
	b. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 20 SKPD tahun 2016																
(4).	Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring														Pokja Manajemen Perubahan Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten
(5).	Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	b. Tindak lanjut monitoring Evaluasi														
(6).	Tindak lanjut perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten
(7).	Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda 70%	b. Perbaikan terhadap sistem pelaksanaan tahun berikutnya														
			a. Penyusunan rencana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya														
			b. Penetapan SKPD untuk menerapkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM														
8.	Penataan Peraturan Perundang-undangan																
	(1). Lanjutan Penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung penerapan PTSP untuk seluruh pelayanan administratif	% dari Jumlah kebijakan baru yang diterbitkan sebagai pengganti peraturan perundang-undangan yang menghambat pelayanan	a. Identifikasi berbagai peraturan perundang-undangan daerah yang dipandang menghambat pelayanan dan penerapan PTSP														Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan Pokja Pelayanan Publik
																	Sudah dilakukan tahun 2015

07 FR

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		60%	b. Penyusunan rencana pembahasan penataan														Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Bagian Hukum	
			c. Lanjutan Perumusan kebijakan perubahan untuk peraturan yang dipandang menghambat pelayanan dan menghambat penerapan PTSP															
			d. Penetapan kebijakan															
			e. Implementasi															
			a. Monitoring															
	(2). Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	% aktivitas penerapan sistem dilaksanakan sesuai target 90%	b. Tindaklanjut monitoring hasil														Pokja Manajemen Perubahan Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan Inspektorat Kabupaten dan Bagian Hukum	
	(3). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem dilaksanakan sesuai target 90%	Evaluasi															
	(4). Tindak lanjut hasil evaluasi	% aktivitas penerapan sistem dilaksanakan sesuai target 90%	Tidak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi															
	(5). Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	Perbaikan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan dalam lingkup Program Penataan Peraturan Perundang-undangan tahun 2016 dan 2017														Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bagian Hukum	
			a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi															
			b. Penyusunan prioritas															
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan															
			d. Perbaikan/penyusunan kembali/penentuan kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															

**Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2018**

← f ↘

u f k r

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab / SKPD terkait	Anggaran						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
5)	Penyempurnaan job grading	Dokumen job grading yang disempurnakan 1 dokumen	e. Tindak lanjut evaluasi hasil perencanaan penyempurnaan job grading																				
			a. Penyempurnaan job grading untuk seluruh jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan																				
			b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring penyempurnaan job grading																				
			c. Penerapan hasil job grading pada penentuan sistem penggajian																				
			d. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																				
			e. Evaluasi																				
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 dan 2017																				
			g. Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir)																				
6)	Lanjutan pengembangan database pegawai	Dokumen rencana pegawai yang sudah disempurnakan 1 dokumen	a. Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir)																	Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD			
			b. Penerapan hasil pada rekrutmen																				
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																				
			d. Evaluasi																				
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017																				
7)	Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru	% CPNS yang direkrut dengan sesuai	a. Penyempurnaan database pegawai																	Pokja dan BKD			
			b. Monitoring dan evaluasi																				
			c. Tindak lanjut																				
8)	Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru	% CPNS yang direkrut dengan sesuai	a. Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru																	Pokja SDM Bagian			
			b. Monitoring dan evaluasi																				

07/12

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		kompetensi dibutuhkan 100%	yang	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi														Organisasi dan BKD	
	9) Penyempurnaan sistem rekrutmen untuk jabatan-jabatan tertentu	% pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 100%	a. Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka c. Penerapan sistem dalam lingkup internal dan eksternal Pemda d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindaklanjut hasil evaluasi 2017 dan 2018															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD	
	10) Review penggunaan hasil assessment kompetensi untuk pengelolaan SDM	% pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 100%	a. Review penggunaan hasil assessment kompetensi untuk pengelolaan SDM b. Penggunaan hasil assessment untuk pengelolaan SDM e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindaklanjut hasil evaluasi 2017 dan 2018															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD	
	11) Updating training need untuk tahun 2017 - 2018	Dokumen rencana pengembangan pegawai 1 dokumen	a. Penyusunan rencana pengembangan pegawai b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pegawai	Sudah dilakukan tahun 2017												Pokja SDM BKD			
	12) Peningkatan kesejahteraan pegawai	% kesejahteraan pegawai 95 %	a. Pelaksanaan kebijakan gaji baru b. Monitoring dan evaluasi c. Tindak lanjut															Pokja BPKAD dan BKD	
				2019															

9/1/15

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab / SKPD terkait	Anggaran					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
13)	Lanjutan pengembangan diklat pegawai sesuai kebutuhan	% pegawai yang mengikuti pengembangan pegawai 30%	a. Pelaksanaan pengembangan pegawai																			
			b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan pengembangan pegawai																			
			c. Evaluasi																			
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi																			
14)	Lanjutan Penerapan rencana penempatan dan pola karier pegawai sesuai dengan kompetensi dan aturan kompetensi dan aturan	% pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 100%	a. Penerapan rencana penerapan dan sistem pola karier pada Sistem Manajemen SDM																			
			b. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier																			
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																			
			d. Evaluasi																			
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																			
15)	Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai	Sistem manajemen kinerja 1 sistem	a. Penyusunan rencana sistem manajemen kinerja pegawai																			
			b. Penyusunan Sistem manajemen kinerja pegawai																			
			c. Uji coba																			
			d. Penyempurnaan hasil uji coba																			
16)	Lanjutan Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai	% SKPD yang menerapkan Sistem 100%	a. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai																			
			b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																			
			c. Evaluasi																			
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2018 - 2019																			
17)	Sosialisasi berbagai kebijakan ASN dan kepegawaian	Jumlah sosialisasi	a. Penyusunan rencana sosialisasi																			

Sudah disusun tahun 2015

07/1/19

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab /SKPD terkait Organisasi dan BKD	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	merencanakan penerapannya	3 kali	b. Pelaksanaan sosialisasi. c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindaklanjut hasil evaluasi															
18)	Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku	Jumlah kebijakan baru yang dilaksanakan Disesuaikan dengan kebijakan yang terbit	a. Penyusunan rencana penerapan b. Penerapan (setelah melalui sosialisasi) c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindaklanjut hasil evaluasi															Pokja SDM Bagian Organisasi dan Tatalaksana BKD
19)	Lanjutan Pelaksanaan pengembangan kepribadian role model	% Pejabat yang memperoleh pengembangan kepribadian 100%	a. Lanjut Pelaksanaan pengembangan role model bagi para pejabat b. Penerapan role model bagi seluruh pejabat c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindaklanjut hasil evaluasi															Pokja SDM Bagian Organisasi dan Tatalaksana BKD
20)	Penegakan disiplin pegawai, pemberian reward dan punishment	Pegawai yang memperoleh %	a. Penyusunan rencana b. Pelaksanaan c. Monitoring dan evaluasi d. Tindak lanjut															Pokja, Tim dan BKD
21)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM b. Tindak lanjut hasil monitoring Evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM															Pokja Manajemen perubahan Bagian Organisasi dan BKD
22)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM															BKD

u/r

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4)	Lanjutan Penerapan SPIP pada SKPD yang belum melaksanakan/belum optimal melaksanakan	70% % SKPD yang menerapkan SPIP 100%	b. Sosialisasi a. Lanjutan Penerapan SPIP di SKPD b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindaklanjut hasil evaluasi tahun 2016 dan 2017														Pengawasan Inspektorat Kabupaten SKPD	
5)	Lanjutan Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 13 Program SDM)	Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 13 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur												Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten BKD				
6)	Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD untuk tahun 2018	Opini BPK WTP	Penyusunan monitoring rencana														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten SKPD	
7)	Sosialisasi tertib administrasi keuangan	Opini BPK WTP	Sosialisasi administrasi tertib														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten SKPD	
8)	Pelaksanaan evaluasi (review) laporan kinerja tahunan SKPD	Hasil evaluasi SAKIP Nilai A	a. Penyusunan rencana evaluasi b. Pelaksanaan evaluasi (review) c. Monitoring dan evaluasi d. Tindak lanjut														Inspektorat kabupaten	
9)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD tahun 2018	Opini BPK WTP	e. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD f. Tindak lanjut hasil monitoring														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten SKPD	
10)	Sosialisasi LHKPN	Prosentase pejabat telah menyerahkan LHKPN	Sosialisasi LHKPN	Sudah dilaksanakan tahun 2015														

No	Program /Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab /SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				Sudah dilaksanakan tahun 2015														
11)	Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Prosentase pejabat yang menyerahkan LHKPN 100%	a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat b. Monitoring penyerahan LHKPN															
12)	Penyusunan rencana sarana penyampaian informasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 85%	Penyusunan rencana sarana pengembangan pengaduan penyampaian informasi terjadinya KKN															
13)	Lanjutan Penerapan sarana pengembangan penyampaian informasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 85%	Penerapan sarana pengembangan penyampaian informasi terjadinya KKN															
14)	Tindak lanjut pengaduan informasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 85%	Tindak lanjut pengaduan informasi terjadinya KKN															
15)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan tahun 2017	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring b. Tindak lanjut hasil monitoring															
16)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan tahun 2017	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan															
17)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan tahun 2017 dan 2018	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi tahun 2017 dan 2018 b. Perbaikan kegiatan program penguatan pengawasan															
18)	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut															

4/1/17

OKTR

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	sebagaimana diidentifikasi pada tahun 2017	80%	lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2017																	
19)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	<p>a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi</p> <p>b. Penyusunan prioritas</p> <p>c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan</p> <p>d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya</p>															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten SKPD		
3.	Penataan Tatalaksana																			
1)	Lanjutan Pelaksanaan/penerapan mekanisme kerja antar SKPD	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan 100%	<p>a. Penerapan mekanisme kerja</p> <p>b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>c. Evaluasi hasil penerapan</p> <p>d. Tindak lanjut hasil evaluasi hasil evaluasi tahun 2017</p>																Pokja Bagian Organisasi	
2)	Penyusunan/penerapan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)	Persentase penyicilenggaraan pemerintahan yang diterapkan 100%	<p>a. Penyusunan SOP baru/ penyempurnaan SO yang ada di SKPD</p> <p>b. Penerapan SOP di SKPD</p> <p>c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>d. Evaluasi hasil penerapan</p> <p>e. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2017 - 2018</p>																Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Bagian Organisasi dan SKPD	
3)	Penyempurnaan e-audit , e-lakip , e-formasi jabatan	Opini BPK WTP	<p>a. Penyempurnaan e-audit</p> <p>b. Lanjutan penerapan e-audit</p>																Pokja Penataan Kelembagaan dan	

01/1/12

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Anggaran									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
4)	Penyempurnaan e-service untuk mendukung PTSP	Tingkat kepuasan pelayanan PTSP 80%	c. Monitoring tindaklanjut monitoring dan hasil monitoring																	Penanggung jawab/SKPD terkait Tatalaksana Dinas Kominfo SKPD, dan Bagian Organisasi					
			d. Evaluasi																						
			e. Tindaklanjut evaluasi tahun 2017																						
			a. Tindaklanjut evaluasi 2017																						
			a. Penyempurnaan e-service PTSP																						
			b. Lanjutan penerapan e-service PTSP																						
5)	Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan teknologi informasi	Prosentase pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi 80%	c. Monitoring tindaklanjut monitoring dan hasil monitoring																			Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo SKPD			
			d. Evaluasi																						
			e. Tindaklanjut evaluasi 2017 - 2018																						
			a. Identifikasi user requirement untuk pelayanan yang akan dibuatkan sistemnya																						
			b. Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan																						
			c. Uji coba Sistem																						
6)	Lanjutan Penerapan keterbukaan informasi publik	Tingkat masyarakat keterbukaan informasi publik 80%	d. Monitoring uji coba dan tindak lanjut hasil monitoring																			Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo SKPD			
			e. Evaluasi uji coba penerapan																						
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi uji coba penerapan																						
			a. Penerapan keterbukaan informasi publik																						
			b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring																						

OKTR

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			c. Evaluasi hasil penerapan d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017																
7)	Penerapan pedoman standarisasi fasilitas kantor dan jabatan	Prosentase fasilitas kerja yang distandarisasikan 85%	a. Penerapan standarisasi fasilitas kantor b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi hasil penerapan d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017															Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Bagian Organisasi dan BPKAD	
8)	Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis (fokus di wilayah pedesaan)	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis	a. Penyusunan rencana Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis di wilayah pedesaan b. Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis di wilayah pedesaan															Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo Bagian Humas	
9)	Kerjasama dengan pihak untuk pembukaan akses internet gratis di wilayah pedesaan	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis 25	Kerjasama dengan pihak berkepentingan untuk pembukaan akses internet gratis di wilayah pedesaan															Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo Bagian Humas	
10)	Pembukaan akses internet gratis baru di wilayah pedesaan	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis 25	a. Sosialisasi dan pembukaan akses internet gratis di wilayah pedesaan b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi hasil penerapan d. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2018															Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo Bagian Humas	
11)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penataan Tatalaksana tahun 2018	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring b. Tindak lanjut hasil monitoring															Pokja Manajemen perubahan Bagian Organisasi dan Tataaksana Inspektorat Daerah	
12)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Tatalaksana tahun 2017	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan																

07/12

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
13)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penataan Tataletaksana 2016 - 2017	80% % kegiatan yg dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kegiatan program Penataan Tataletaksana b. Perbaikan kegiatan program Penataan Tataletaksana															Pokja Penataan Kelembagaan dan Tataletaksana Dinas Kominfo Bagian Humas			
14)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya																		
4.	Penguatan Akuntabilitas																				
1)	Review rencana strategis pemerintah daerah	Nilai kinerja akuntabilitas A	a. Penyusunan rencana review renstra dan perbaikannya b. Review rencana strategis pemerintah daerah																Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Bappeda Bagian Organisasi dan Tata Laksana Inspektorat Daerah		
2)	Penyempurnaan indikator kinerja dan penetapan kinerja	Nilai kinerja akuntabilitas A	a. Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja yang sudah direview b. Penerapan sasaran indikator kinerja dan penetapan kinerja yang sudah direview c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2015 - 2016																		
3)	Penyusunan laporan kinerja tahun instansi pemerintah dan perlanjutan kinerja tahunan	Nilai A	a. Penyusunan rencana laporan b. Pelaksanaan penyusunan laporan c. Monitoring dan evaluasi d. Tindak lanjut																	Pokja, Bagian Organisasi dan SKPD	

2019

07/12

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4)	Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja	Nilai kinerja akuntabilitas A	Penyusunan rencana sistem manajemen kinerja	Sudah dilaksanakan tahun 2015													
5)	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja	Nilai kinerja akuntabilitas A	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja	Sudah dilaksanakan tahun 2015													
6)	Lanjutan Pelaksanaan manajemen kinerja	Nilai kinerja akuntabilitas A	a. Pelaksanaan manajemen kinerja b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring c. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017													Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Bappeda Bagian Organisasi dan Inspektoral Kabupaten SKPD	
7)	Penyempurnaan Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)	Prosentase pegawai yang capaian kerjanya sesuai target	a. Penyempurnaan Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai) b. Penerapan Sistem Manajemen Kinerja yang telah diintegrasikan dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017													Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Bappeda Bagian Organisasi dan Inspektoral Kabupaten BKD SKPD	
8)	Pengumpulan, perbaikan, dan pengelolaan data kinerja	Nilai kinerja akuntabilitas A	a. Penyusunan rencana Pengumpulan, dan pengelolaan data kinerja b. Pengumpulan, dan perbaikan, dan pengelolaan data kinerja c. Monitoring, dan perbaikan, dan Pengumpulan, dan													Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Bappeda Bagian Organisasi dan Tata Laksana Inspektoral Daerah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			pengelolaan data kinerja dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi hasil penerapan															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
			a. Penyusunan rencana															
			b. Pelaksanaan sosialisasi															
			c. Monitoring dan evaluasi															
			d. Tindak Lanjut															
			a. Monitoring terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas															
			b. Tindaklanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas															
			Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas															
			a. Tindaklanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas															
			b. Perbaikan kegiatan program Penguatan Akuntabilitas															
			a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi															
			b. Penyusunan prioritas															
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan															
			d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															
			9) Sosialisasi Perda dan Perbup															
			10) Monitoring dan tindaklanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas 2017															
			% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target															
			80%															
			11) Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas tahun 2017															
			% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target															
			80%															
			12) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2015 - 2017															
			% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target															
			80%															
			13) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas Aparatur di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya															
			% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru															
			100%															

6/12

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan 1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 80%	a. Penyusunan rencana survey masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan b. Penyusunan/penyempurnaan instrumen survey dan uji cobanya c. Pelaksanaan survey d. Pengolahan data dan analisis hasil survey e. Penyusunan rekomendasi																	
			Identifikasi kebutuhan manajemen perbaikan pelayanan																	
			3) Penyusunan rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat																	
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 70%	a. Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan sesuai dengan rekomendasi dan identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan b. Penyusunan kerangka peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan																	

Sudah dilaksanakan tahun 2015

07/10/15

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
4)	Penyusunan laporan SPM	Capaian target 80 %	daerah yang dianggap menghambat														Pokja bagian organisasi dan SKPD			
			a. Penyusunan rencana																	
			b. Pelaksanaan laporan SPM																	
			c. Monitoring dan evaluasi																	
5)	Pengkajian penerapan PTSP	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 80%	d. Tindak Lanjut														Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan BPMPT SKPD			
			a. Pengkajian penerapan PTSP	Sudah dilaksanakan tahun 2014																
			b. Penyusunan kerangka sistem PTSP	Sudah dilaksanakan tahun 2014																
			c. Penyusunan rencana penerapan	Sudah dilaksanakan tahun 2014																
			d. Penerapan PTSP sesuai rencana	Sudah dilaksanakan tahun 2014																
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan	Sudah dilaksanakan tahun 2014																
			f. Evaluasi	Sudah dilaksanakan tahun 2014																
6)	Lanjutan pelaksanaan PTSP untuk Quick Wins	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 70%	g. Tindak lanjut hasil evaluasi														Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan BPMPT SKPD			
			a. Lanjut Penerapan PTSP sebagai Quick wins	Sudah dilaksanakan 2014 -2015																
			b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan	Sudah dilaksanakan 2014 -2015																
			c. Evaluasi	Sudah dilaksanakan 2014 -2015																
7)	Pembangunan dan pemeliharaan PTSP untuk seluruh jenis pelayanan administratif	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 70%	d. Tindak lanjut hasil evaluasi														Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan BPMPT SKPD			
			a. Pelaksanaan PTSP	Sudah dilaksanakan 2014 -2015																
			b. Monitoring dan tindak lanjut monitoring	Sudah dilaksanakan 2014 -2015																
			c. Evaluasi	Sudah dilaksanakan 2014 -2015																
8)	Penerapan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya	d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017														Pokja Pelayanan Publik Bagian			
			a. Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi pada sistem pelayanan (dislaraskan	Sudah dilakukan tahun 2015																
			b. Monitoring dan tindak lanjut monitoring	Sudah dilakukan tahun 2015																
			c. Evaluasi	Sudah dilakukan tahun 2015																

01/11/2

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			dengan kegiatan nomor 5 dan 6 Program Penataan Tatalaksana) b. Identifikasi user requirement c. Uji coba sistem d. Penerapan teknologi informasi pada jenis pelayanan yang masuk PTSP dan menjadi quick wins) e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi													Organisasi dan Tata Laksana Dinas Kominfo Humas SKPD	
9)	Lanjutan penerapan standar pelayanan (SP)	% penerapan 100 %	a. Penerapan SP b. Monitoring dan evaluasi c. Tindak lanjut													Pokja bagian organisasi	
10)	Lanjutan Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2015	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 70%	a. Lanjut Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan sesuai dengan kerangka peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 2 b. Monitoring dan tindak lanjut perbaikan manajemen pelayanan c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 dan 2017													Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan BPMPT, Diskominfo SKPD	
11)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b. Tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik													Pokja Manajemen Perubahan Bagian Organisasi dan Inspektorat Kabupaten	
12)	Evaluasi terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai	Evaluasi terhadap seluruh kegiatan														

6/1/17

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab / SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Kualitas Pelayanan Publik	target 80%	Peningkatan Pelayanan Publik																
	13) Penerapan media center dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Hasil pelayanan 80 %	a. Pelaksanaan media center b. Monitoring dan evaluasi c. Tindak lanjut															Pokja, Inspektorat Kabupaten, Bagian Organisasi, Humas, Diskominfo dan BKD	
	14) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak hasil evaluasi seluruh program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b. Perbaikan pelaksanaan kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2015 - 2016															Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan Humas SKPD	
	15) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-prioritas dimaksud dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/ penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan Humas SKPD	
6.	Quick Wins 1) Pilot Project Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online	Tingkat kemampuan masyarakat terhadap pelayanan informasi perizinan dan non perizinan	Identifikasi requirement informasi perizinan dan non perizinan berbasis online															Pokja Pelayanan Publik, BPMPT dan Dinas Kominfo	
			Sudah dilakukan tahun 2015																

6/1/15

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab / SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		berbasis online																
	(2). Penyusunan sistem	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi perizinan dan non perizinan berbasis online 80%	Penyusunan sistem															
	(3). Ujicoba sistem	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi perizinan dan non perizinan berbasis online 80%	Ujicoba sistem															
	(4). Penyempurnaan sistem	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi perizinan dan non perizinan berbasis online 80%	Penyempurnaan sistem															
	(5). Penerapan sistem	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi perizinan dan non perizinan berbasis online 80%	Penerapan sistem															
	(6). Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring pelaksanaan sistem b. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring															Pokja Manajemen Perubahan BPMPT, Dinas Kominfo
	(7). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap penerapan sistem															

UAT

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab / SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	(8). Pemeliharaan/Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online	90% % aktivitas penerapan sistem dilaksanakan sesuai target	a. Pemeliharaan/ pengembangan sistem b. Lanjutan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online														Pokja Pelayanan Publik BPMPT, Dinas Kominfo		
	2) Penerapan PTSP																		
	(1). Pengkajian penerapan PTSP (dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan nomor 4) program Peningkatan Kualitas Pelayanan)																	Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan Tata Laksana Humas SKPD	
	(2). Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP dalam waktu singkat																		
	(3). Penyusunan rancangan PTSP (menyangkut kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya)																		
	(4). Uji coba																		
	(5). Penyempurnaan hasil uji coba																		
	(6). Sosialisasi																		
	(7). Lanjutan Penerapan PTSP Quick Wins	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP 80%	Lanjutan Penerapan PTSP																
	(8). Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring b. Tindaklanjut monitoring hasil																

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	(9). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem dilaksanakan sesuai target 90%	Evaluasi	Sudah dilakukan tahun 2014 -2016													
	(10). Pemeliharaan dan pengembangan PTSP Quick Wins untuk jenis-jenis pelayanan yang diperluas (lihat kegiatan nomor 6)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP 80%	Pemerintahan PTSP yang sudah berjalan baik Penerapan PTSP														
7.	Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																
	(1). Penyiapan 20 SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 20	Penyiapan 20 SKPD sebagai unit yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM													Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten	
	(2). Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 30	Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM														
	(3). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 20 SKPD yang sudah ditetapkan sebagai ZI dan SKPD yang baru ditetapkan untuk menerapkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2016	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda 80%	a. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di SKPD yang sudah menerapkan ZI b. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 20 SKPD tahun 2016														
	(4). Monitoring	% aktivitas penerapan sistem dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring yang dilaksanakan sesuai target b. Tindaklanjut hasil monitoring														Pokja Manajemen Perubahan Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten
	(5). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem dilaksanakan sesuai target 90%	Evaluasi														

07/12

No	Program /Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	(3). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem dilaksanakan sesuai target 90%	Evaluasi															Bagian Hukum	
	(4). Tindak lanjut hasil evaluasi	% aktivitas penerapan sistem dilaksanakan sesuai target 90%	Tidak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi															Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bagian Hukum	
	(5). Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	Perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam Program Penataan Peraturan Perundang-undangan tahun 2016 dan 2017 a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya																
9.	Penguatan dan Penataan Organisasi 1) Penataan organisasi yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung penerapan PTSP sebagai quick wins	Jumlah organisasi yang ditata 60%	a. Lanjutan Pelaksanaan perubahan kebijakan yang dianggap menghambat pelayanan dan menghambat penerapan PTSP b. Monitoring c. Tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi															Pokja Penataan Kelembagaan dan Tata laksana Bagian Organisasi, BPMPT	

07/12

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2)	Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih	Persentase tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	a. Penyusunan rencana penataan terhadap tugas dan fungsi dengan dasar hasil pemetaan proses bisnis b. Perumusan penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih (termasuk menata kelembagaan) c. Pencerapan penataan hasil d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Pokja Penataan Kelembagaan dan Tataletaksana Bagian Organisasi dan SKPD	

**Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019**

KKR

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1) Penerapan Hasil Evaluasi jabatan	Dokumen hasil evaluasi jabatan 1 dokumen	a. Lanjutan Penerapan hasil evaluasi jabatan pada Sistem MSDM Aparatur															Bagian Organisasi dan BPKAD		
			b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			c. Evaluasi																	
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
	2) Penyempurnaan hasil analisis jabatan (jika diperlukan, sesuai hasil evaluasi)	Dokumen hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan 1 Dokumen	a. Penyempurnaan Hasil analisis jabatan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD		
			b. Penerapan hasil penyempurnaan pada jabatan																	
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			d. Evaluasi																	
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
	3) Penyempurnaan Hasil Analisis beban Kerja (jika diperlukan, sesuai dengan hasil evaluasi)	Dokumen hasil analisis beban kerja yang sudah disempurnakan 1 Dokumen	a. Penyempurnaan hasil ABK sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD		
			b. Penerapan hasil pada jabatan dan kebutuhan pegawai																	
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			d. Evaluasi																	
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
	4) Penyempurnaan standar kompetensi jabatan (jika diperlukan, sesuai dengan hasil evaluasi)	Dokumen standar jabatan yang sudah disempurnakan 1 dokumen	a. Penyempurnaan standar kompetensi jabatan															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD		
			b. Penerapan hasil pada jabatan																	
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	

6/1/17

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
5)	Penyempurnaan job grading	Dokumen job grading yang disempurnakan 1 dokumen	d. Evaluasi																			
			e. Tindak lanjut evaluasi																			
			a. Penyusunan rencana penyempurnaan job grading																			
			b. Penyempurnaan job grading untuk seluruh jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan																			
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring penyempurnaan job grading																			
			d. Penerapan hasil job grading pada penentuan sistem penggajian																			
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																			
			f. Evaluasi																			
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 dan 2017																			
			6)	Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir)	Dokumen rencana kebutuhan pegawai yang sudah disempurnakan 1 dokumen	a. Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir)																
b. Penerapan hasil pada rekrutmen																						
c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																						
d. Evaluasi																						
e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 - 2018																						
7)	Lanjutkan pengembangan database pegawai	Sistem 1 sistem	a. Penyempurnaan database pegawai																Pokja dan BKD			
			b. Monitoring dan evaluasi																			
			c. Tindak Lanjut																			
8)	Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru (tahun 2018)	% CPNS yang direkrut dengan sesuai	a. Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru																Pokja SDM Bagian			

0/42

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		kompetensi dibutuhkan yang 100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi															Organisasi dan BKD	
		% pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	d. Tindaklanjut hasil evaluasi 2017 dan 2018 a. Penyempurnaan Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD	
		100%	b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka c. Penerapan sistem dalam lingkup internal dan eksternal Pemda d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindaklanjut hasil evaluasi 2016 dan 2017															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD	
		% pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 100%	a. Review penggunaan hasil assessment kompetensi untuk pengelolaan SDM b. Penggunaan hasil assessment untuk pengelolaan SDM e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindaklanjut hasil evaluasi 2017 dan 2018															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD	
		Dokumen rencana pengembangan pegawai 1 dokumen	a. Penyusunan rencana pengembangan pegawai b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pegawai	Sudah dilakukan tahun 2016												Pokja SDM dan BKD			
		% kesejahteraan pegawai 100 %	a. Pencapaian gaji baru b. Monitoring dan evaluasi c. Tindak lanjut															Pokja BPKAD dan BKD	

4770

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Anggaran						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	merencanakan penerapannya	3 kali	b. Pelaksanaan sosialisasi																			
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																			
			d. Evaluasi																			
			e. Tindaklanjuti hasil evaluasi																			
			a. Penyusunan rencana penerapan																			
18)	Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku	Jumlah kebijakan baru yang dilaksanakan Disesuaikan dengan kebijakan yang terbit	b. Penerapan (setelah melalui sosialisasi)																			
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																			
			d. Evaluasi																			
			e. Tindaklanjuti hasil evaluasi																			
			a. Lanjutan Pelaksanaan pengembangan role model bagi para pejabat																			
19)	Lanjutan Pelaksanaan pengembangan kepribadian role model	% Pejabat yang memperoleh pengembangan kepribadian	b. Penerapan role model bagi seluruh pejabat																			
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																			
			d. Evaluasi																			
			e. Tindaklanjuti hasil evaluasi																			
			a. Lanjutan Pelaksanaan pengembangan role model bagi para pejabat																			
20)	Penegakan disiplin pegawai pemberian reward dan punishment	Pegawai yang memperoleh %	b. Penerapan role model bagi seluruh pejabat																			
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																			
			d. Evaluasi																			
			e. Tindaklanjuti hasil evaluasi																			
			a. Penyusunan rencana																			
21)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	b. Pelaksanaan																			
			c. Monitoring dan evaluasi																			
			d. Tindak lanjut																			
			a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM																			
			b. Tindak lanjut hasil monitoring																			

g A T R

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
22)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi pelaksanaan kegiatan program SDM terhadap seluruh kegiatan program SDM															BKD	
23)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM yang telah dilakukan pada tahun 2015	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2014 b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program SDM yang telah dilaksanakan pada tahun 2017															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD	
24)	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2017	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2017																
25)	Penyusunan prioritas baru tahun 2019 serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan pada tahun 2019 sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															Pokja SDM Bagian Organisasi dan BKD	
2.	Penguatan Pengawasan 1) Review penyempurnaan rencana kebutuhan tenaga auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 6 dalam Program SDM)	Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 6 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur																Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Daerah BKD	

SKR

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 11 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur																	
2)	Review rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 11 dalam Program SDM)																	
3)	Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP	% SKPD yang menerapkan SPIP	a. Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Daerah SKPD	
4)	Lanjutan Penerapan SPIP pada SKPD yang belum melaksanakan/belum optimal melaksanakan	70% % SKPD yang menerapkan SPIP 100%	b. Sosialisasi a. Lanjutan Penerapan SPIP di SKPD b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindaklanjuti hasil evaluasi tahun 2016 dan 2017															
5)	Lanjutan Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 13 Program SDM)																	
	Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 13 Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur																	
6)	Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD untuk tahun 2018	Opini BPK WTP	Penyusunan monitoring rencana															
7)	Sosialisasi tertib administrasi keuangan	Opini BPK WTP	Sosialisasi administrasi tertib															
8)	Pelaksanaan evaluasi (review) laporan kinerja tahunan SKPD	Hasil evaluasi SAKIP Nilai A	a. Penyusunan rencana evaluasi b. Pelaksanaan evaluasi (review) c. Monitoring dan evaluasi d. Tindak lanjut															

Handwritten signature or initials at the top of the page.

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab / SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
9)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD tahun 2018	Opini BPK	a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD b. Tindak lanjut hasil monitoring															
10)	Sosialisasi LHKPN	Prosentase pejabat telah menyerahkan LHKPN 100%	Sosialisasi LHKPN	Sudah dilaksanakan tahun 2015														
11)	Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Prosentase pejabat telah menyerahkan LHKPN 100%	a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat b. Monitoring penyerahan LHKPN	Sudah dilaksanakan tahun 2015														
12)	Penyusunan rencana pengembangan sarana penyampaian informasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 85%	Penyusunan rencana sarana pengembangan penyampaian informasi terjadinya KKN	Sudah disusun / dilaksanakan tahun 2015												Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten		
13)	Lanjutan Penerapan sarana penyampaian informasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 85%	Penerapan sarana pengembangan penyampaian informasi terjadinya KKN															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten
14)	Tindak lanjut pengaduan informasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 85%	Tindak lanjut pengaduan informasi terjadinya KKN															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten
15)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan tahun 2018	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring b. Tindak lanjut hasil monitoring															Pokja Manajemen perubahan Bagian Organisasi dan Inspektorat Kabupaten
16)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan tahun 2018	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan															
17)	Tindak lanjut hasil evaluasi	% kegiatan yang	a. Tindak lanjut terhadap															Pokja

9/1/18

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan tahun 2017 dan 2018	dilaksanakan sesuai target	hasil monitoring dan evaluasi tahun 2016 dan 2017															Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten SKPD	
	18) Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut tekah sebagaimana diidentifikasi pada tahun 2017	80% % kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	b. Perbaikan kegiatan program penguatan pengawasan Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana tekah diidentifikasi pada tahun 2017																
	19) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten SKPD	
3.	Penataan Tataaksana																		
	1) Lanjutan Pelaksanaan/penerapan mekanisme kerja antar SKPD	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan 100%	a. Penerapan mekanisme kerja b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi hasil penerapan d. Tindak lanjut hasil evaluasi hasil evaluasi tahun 2016															Pokja Bagian Organisasi dan	
	2) Penyusunan/penerapan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan 100%	a. Penyusunan SOP baru/ penyempurnaan SOP yang ada di SKPD b. Penerapan SOP di SKPD c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil															Pokja Penataan Kelembagaan dan Tataaksana Bagian Organisasi dan SKPD	

6/10

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Anggaran						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
3)	Penyempurnaan e-audit, e-lakip, e-formasi jabatan	Opini BPK WTP	d. monitoring																Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo SKPD dan Bagian Organisasi			
			e. Evaluasi hasil penerapan																			
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2017 - 2018																			
			a. Penyempurnaan e-audit																			
			b. Lanjutan penerapan e-audit																			
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																			
4)	Penyempurnaan e-service untuk mendukung PTSP	Tingkat kepuasan pelayanan PTSP 80%	d. Evaluasi																Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo SKPD			
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2017																			
			a. Penyempurnaan e-service PTSP																			
			b. Lanjutan penerapan e-service PTSP																			
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																			
			d. Evaluasi																			
5)	Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan teknologi informasi	Prosentase pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi 80%	e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 - 2018																Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Dinas Kominfo SKPD			
			a. Identifikasi user requirement untuk semua jenis pelayanan yang akan dibuatkan sistemnya																			
			b. Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan																			
			c. Uji coba Sistem																			
			d. Monitoring uji coba dan tindak lanjut hasil monitoring																			
			e. Evaluasi uji coba penerapan																			
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi uji coba penerapan																			
				2016																		

2/1/2

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Anggaran				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
6)	Lanjutan Penerapan keterbukaan informasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik 80%	a. Penerapan keterbukaan informasi publik																	
			b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			c. Evaluasi hasil penerapan																	
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017																	
7)	Penerapan pedoman standarisasi fasilitas kantor dan jabatan	Prosentase fasilitas kerja yang distandarisasikan 85%	a. Penerapan standarisasi fasilitas kantor																	
			b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			c. Evaluasi hasil penerapan																	
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017																	
8)	Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis (fokus di wilayah pedesaan)	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis 25	a. Penyusunan rencana Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis di wilayah pedesaan																	
			b. Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis di wilayah pedesaan																	
9)	Kerjasama dengan pihak berkepentingan pembukaan akses internet gratis di wilayah pedesaan	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis 25	Kerjasama dengan pihak berkepentingan untuk pembukaan akses internet gratis di wilayah pedesaan																	
			a. Sosialisasi dan Pembukaan akses internet gratis di di wilayah pedesaan																	
10)	Pembukaan akses internet gratis baru di wilayah pedesaan	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis 25	b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			c. Evaluasi hasil penerapan dan tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2018																	

0112

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
11)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penataan Tatalaksana tahun 2018	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring b. Tindak lanjut hasil monitoring																							
12)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Tatalaksana tahun 2017	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan																							
13)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penataan Tatalaksana 2016 - 2017	% kegiatan yg dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi b. Perbaikan kegiatan program Penataan Tatalaksana																							
14)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya																							
4.	Penguatan Akuntabilitas																									
1)	Review rencana strategis pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas kinerja AA	a. Penyusunan rencana review renstra dan perbaikannya b. Review rencana strategis pemerintah daerah																							
2)	Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja AA	a. Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja b. Penerapan sasaran indikator kinerja dan penetapan kinerja yang sudah direview c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan																							

6/1/17

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3)	Penyusunan laporan kinerja tahunan instansi pemerintah dan perjanjian kinerja tahunan	Nilai A	<p>c. Tindak lanjut hasil evaluasi 2015 - 2016</p> <p>a. Penyusunan rencana laporan</p> <p>b. Pelaksanaan penyusunan laporan</p> <p>c. Monitoring dan evaluasi</p> <p>d. Tindak lanjut</p>														Pokja, Bagian Organisasi dan SKPD	
4)	Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja	Nilai kinerja AA	Penyusunan rencana sistem manajemen kinerja	Sudah dilaksanakan tahun 2015														
5)	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja	Nilai kinerja AA	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja	Sudah dilaksanakan tahun 2015														
6)	Lanjutan Pelaksanaan manajemen kinerja	Nilai kinerja AA	<p>a. Pelaksanaan manajemen kinerja</p> <p>b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>c. Evaluasi hasil penerapan</p> <p>d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017</p>														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Bappeda Bagian Organisasi dan Inspektorat Kabupaten SKPD	
7)	Penyempurnaan Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)	Prosentase pegawai capaian kerjanya sesuai target 85%	<p>a. Penyempurnaan Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)</p> <p>b. Penerapan Sistem Manajemen Kinerja yang telah diintegrasikan dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai</p> <p>c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>d. Evaluasi hasil penerapan</p> <p>e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017</p>														Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Bappeda Bagian Organisasi dan Inspektorat Kabupaten BKD SKPD	
8)	Pengumpulan, perbaikan, dan pengelolaan data kinerja	Nilai kinerja	a. Penyusunan rencana Pengumpulan,														Pokja Akuntabilitas	

0/1/15

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	kemajuan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas Aparatur di Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	100%	<p>b. Penyusunan prioritas kegiatan yang akan dilakukan</p> <p>c. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya</p>														
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan																
	1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 80%	<p>a. Penyusunan rencana survey kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan</p> <p>b. Penyusunan/penyempurnaan instrumen survey dan uji cobanya</p> <p>c. Pelaksanaan survey</p> <p>d. Pengolahan data dan analisis hasil survey</p> <p>e. Penyusunan rekomendasi</p>														
	2) Identifikasi kebutuhan manajemen pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 70%	Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan														
	3) Penyusunan rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : peneredharaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (TPSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 70%	<p>a. Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan sesuai dengan rekomendasi dan identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan</p> <p>b. Penyusunan kerangka peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : peneredharaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi</p>														

Sudah dilaksanakan tahun 2015

Q A R

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat															
4)	Penyusunan laporan SPM	Capaian target 100 %	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana b. Pelaksanaan laporan c. Monitoring dan evaluasi d. Tindak lanjut 															
5)	Pengkajian penerapan PTSP	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 80%	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian penerapan PTSP b. Penyusunan kerangka sistem PTSP c. Penyusunan rencana penerapan d. Penerapan PTSP sesuai rencana e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi 	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan ,BPMPT SKPD		
6)	Lanjutan pelaksanaan PTSP untuk Quick Wins	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 70%	<ul style="list-style-type: none"> a. Lanjutan Penerapan PTSP sebagai Quick wins b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan BPMPT, SKPD		
7)	Pengembangan dan pemeliharaan PTSP untuk seluruh jenis pelayanan administratif	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 70%	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan PTSP b. Monitoring dan tindak lanjut monitoring c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017 	Sudah dilaksanakan 2014 -2016												Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan BPMPT, SKPD		

O A F R

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
8)	Penerapan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 70%	a. Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi pada sistem pelayanan (diselaraskan dengan kegiatan nomor 5 dan 6 Program Penataan Tatalaksana) b. Identifikasi user requirement c. Uji coba sistem d. Penerapan teknologi informasi pada jenis pelayanan yang masuk PTSP dan menjadi quick wins) e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi	Sudah dilakukan tahun 2015												Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan Dinas Korminfo Humas SKPD				
9)	Lanjutan penerapan standar pelayanan (SP)	% penerapan 100 %	a. Penerapan SP b. Monitoring dan evaluasi c. Tindak lanjut																Pokja Bagian Organisasi dan	
10)	Lanjutan Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Kubu Raya 70%	a. Lanjutan Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan sesuai dengan kerangka peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 2 b. Monitoring dan tindak lanjut perbaikan manajemen pelayanan c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 dan 2017																Pokja Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan BPMPT, Diskominfo SKPD	
11)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring terhadap seluruh program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b. Tindak lanjut hasil monitoring seluruh program																Pokja Manajemen Perubahan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Inspektorat Kabupaten	

0/1/12

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	12) Evaluasi terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Peningkatan Pelayanan Publik Evaluasi terhadap seluruh program Peningkatan Pelayanan Publik																
	13) Penerapan media center dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Hasil pelayanan 100%	a. Pelaksanaan media center b. Monitoring dan evaluasi c. Tindak lanjut																
	14) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	d. Tindak hasil evaluasi seluruh program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik e. Perbaikan pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2015 - 2016																
	15) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya																
6.	Quick Wins 1) Pilot Project Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Identifikasi requirement informasi user sistem pelayanan perizinan dan non perizinan																
	(1). Identifikasi user requirement sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan																		

Sudah dilakukan tahun 2015

01/11/15

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab / SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	berbasis online	sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online 80%	perizinan dan non perizinan berbasis online														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kominfo	
	(2). Penyusunan sistem	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi perizinan dan non perizinan berbasis online 80%	Penyusunan sistem	Sudah dilakukan tahun 2015														
	(3). Ujicoba sistem	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi perizinan dan non perizinan berbasis online 80%	Ujicoba sistem	Sudah dilakukan tahun 2015														
	(4). Penyempurnaan sistem	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi perizinan dan non perizinan berbasis online 80%	Penyempurnaan sistem	Sudah dilakukan tahun 2015														
	(5). Penerapan sistem	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi perizinan dan non perizinan berbasis online 80%	Penerapan sistem	Sudah dilakukan tahun 2015														
	(6). Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring pelaksanaan sistem b. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring	Sudah dilakukan tahun 2015												Pokja Manajemen Perubahan BPMPPT dan Dinas Kominfo		
	(7). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang	Evaluasi terhadap penerapan sistem	Sudah dilakukan tahun 2016														

O.A.T R

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	(9). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem dilaksanakan sesuai target 90%	Evaluasi monitoring	Sudah dilakukan tahun 2015 -2016													
	(10). Pemeliharaan dan pengembangan PTSP Quick Wins untuk jenis-jenis pelayanan yang diperluas (lihat kegiatan nomor 6)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP 80%	Pemeriharaan PTSP yang sudah berjalan baik Penerapan PTSP														
7.	Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																
	(1). Penyiapan 20 SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 20	Penyiapan 20 SKPD sebagai unit yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM													Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten	
	(2). Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 30	Pencanaan Integritas Menuju WBK/WBBM														
	(3). Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 20 SKPD yang sudah ditetapkan sebagai ZI dan SKPD yang baru ditetapkan untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2016	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda 80%	a. Pelaksanaan Integritas Menuju WBK/WBBM di SKPD yang sudah menerapkan ZI b. Pelaksanaan Integritas Menuju WBK/WBBM di 20 SKPD tahun 2016														
	(4). Monitoring	% aktivitas penerapan sistem dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring b. Tindaklanjut hasil monitoring														Pokja Manajemen Perubahan Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten
	(5). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem dilaksanakan sesuai target 90%	Evaluasi														

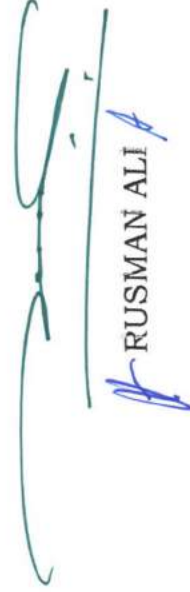
No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung Jawab/SKPD terkait	Anggaran				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	(6). Tindak lanjut perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi sistem pelaksanaan berikutnya b. Perbaikan terhadap rencana penetapan Integritas WBK/WBBM untuk SKPD lainnya																		
	(7). Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda 70%	a. Penyusunan rencana Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya b. Penetapan SKPD untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM																		
8.	Penataan Peraturan Perundang-undangan (1). Lanjutan Penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung penerapan PTSP untuk seluruh pelayanan administratif	% dari Jumlah kebijakan baru yang diterbitkan sebagai pengganti peraturan perundang-undangan yang menghambat pelayanan 60%	a. Identifikasi berbagai peraturan perundang-undangan daerah yang dipandang menghambat pelayanan dan menghambat penerapan PTSP	Sudah dilakukan tahun 2015												Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan Pokja Pelayanan Publik Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Bagian Hukum					
			b. Penyusunan rencana pembahasan penataan													Sudah dilakukan tahun 2015					
			c. Lanjutan Perumusan kebijakan perubahan untuk peraturan yang dipandang menghambat pelayanan dan menghambat penerapan PTSP d. Penetapan kebijakan e. Implementasi																		
	(2). Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring																		
	(3). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang	b. Tindak lanjut monitoring hasil Evaluasi																		

0-11-1

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	(4). Tindak lanjut hasil evaluasi	dilaksanakan sesuai target 90% % aktivitas penerapan sistem dilaksanakan sesuai target 90%	Tidak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi Perbaikan terhadap pelaksanaan dalam lingkup Program Penataan Perundang-undangan tahun 2016 dan 2017															Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bagian Hukum	
	(5). Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya																
9.	Penguatan dan Penataan Organisasi 1) Penataan organisasi yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung penerapan PTSP sebagai quick wins	Jumlah organisasi yang ditata 60%	a. Lanjutan Pelaksanaan perubahan kebijakan yang dianggap menghambat pelayanan dan menghambat penerapan PTSP b. Monitoring c. Tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi															Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Bagian Organisasi dan BPMPT	
	2) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan 80%	a. Penyusunan rencana penataan terhadap tugas dan fungsi dengan dasar hasil pemetaan proses bisnis b. Perumusan penataan terhadap tugas dan	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Pokja Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Bagian Organisasi dan SKPD			
				Sudah dilaksanakan tahun 2015															

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			fungsi yang tumpang tindih (termasuk menata kelembagaan)															
			c. Penerapan hasil penataan															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi															

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Ditandatangani di Sungai Raya
 Pada tanggal 2 Maret 2016
 PIA. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ÓDANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2016 NOMOR 8